



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman:<http://www.unimal.ac.id>

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meninjaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, yang digunakan sebagai pedoman bagi Universitas Malikussaleh;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pencapaian target dan penyesuaian Program Kerja (PK) Rektor Universitas Malikussaleh dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dimasukkan dalam Rencana Strategis (Restra) Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020-2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unimal adalah dokumen perencanaan Universitas Malikussaleh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kemendikbud.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Unimal merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Universitas Malikussaleh setiap tahun dalam rangka pengembangan Universitas Malikussaleh pada periode 2020-2024.
- (2) Renstra Unimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan unit kerja fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis dalam menyusun Rencana Strategis unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Renstra Unimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi, misi, dan tujuan;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. penutup.

(4) Renstra Unimal merupakan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 3

Renstra Unimal, setiap tahun dituangkan dalam Kebijakan Program Kerja Tahunan Universitas Malikussaleh, dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja Universitas Malikussaleh tahun berikutnya.

### Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara  
pada tanggal 20 Juli 2020

REKTOR,



HERMAN FITHRA

NIP 197211072003121001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
MALIKUSSALEH NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

**“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”**  
**(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkeadilan, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkeadilan dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana

diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. **Pertama**, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antarmanusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*.

**Kedua**, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

**Ketiga**, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

**Keempat**, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya

membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tidak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance* dan *temporary*) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) kebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

BAB I Renstra UNIMAL ini terstruktur sebagai berikut:

- a. Latar belakang penyusunan Renstra UNIMAL 2020-2024
- b. Profil Universitas Malikussaleh
- c. Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- d. Permasalahan yang masih dihadapi; dan
- e. Tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra UNIMAL 2020-2024.

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024

Penyusunan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 adalah upaya meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemerataan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi, khususnya anak-anak bangsa di 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Penyusunan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 mengikuti dan menyesuaikan dengan Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024, sehingga Renstra ini dapat bersinergi dan membantu pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024 dan target Kemendikbud sampai dengan tahun 2024.

### *A. Latar Belakang*

Universitas Malikussaleh (UNIMAL) mempunyai 3 (tiga) lokasi kampus yang berada di tiga Kabupaten/Kota, yaitu kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Pidie. Di kabupaten Aceh Utara lokasi kampus berada di Desa Reuleut Timu dan Reuleut Barat Kecamatan Muara Batu, sedangkan Desa Paya Gaboh dan Cot Keumuneung di Kecamatan Sawang. Di kota Lhokseumawe lokasi kampus berada di Desa Blang Panyang dan Padang Sakti Kecamatan Muara Satu. Selain di Muara Satu lokasi kampus juga berada di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua dan di desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti. UNIMAL terus melebarkan sayap untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap warga negara salah satunya adalah menerima penggabungan Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Pidie (Sigli) ke dalam manajemen UNIMAL. Lokasi kampus AKPER Sigli berada di desa Lampeudeu Tunong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie (Sigli).

UNIMAL menyelenggarakan Pendidikan Diploma III, Sarjana, Profesi, Magister dan sedang merintis penyelenggaraan Pendidikan Program Doktorat Manajemen, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. Program Diploma III terdiri dari Program Diploma Pendidikan Kesekretariatan (PDPK) di Fakultas Ekonomi dan Akademi Keperawatan di Fakultas Kedokteran. Program sarjana terdiri dari Ilmu Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Antropologi dan Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Pada Fakultas Ekonomi program studi sarjana terdiri dari Program Studi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Kewirausahaan. Fakultas Hukum hanya ada Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Teknik sebagai fakultas terbesar memiliki program studi sarjana yang terdiri dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Arsitektur, Sistem Informasi, Teknik Material dan Teknik Logistik. Pada Fakultas Pertanian program studi sarjana adalah Agroekoteknologi, Agribisnis, Akuakultur dan Ilmu Kelautan. Fakultas Kedokteran terdiri dari dua program studi sarjana, yaitu Kedokteran dan Psikologi. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Pendidikan Profesi hanya untuk Program Studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran. Program studi magister terdiri dari Magister Administrasi Publik dan Magister Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Pada Fakultas Ekonomi ada program studi Magister Ilmu Manajemen dan Magister Ekonomi Pembangunan. Fakultas Teknik memiliki Magister Teknik Energi Terbarukan, Magister Teknik Sipil dan Magister Teknologi Informasi. Di Fakultas Pertanian ada program studi Magister Agroekoteknologi dan Magister Agribisnis.

UNIMAL telah berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang, selain itu juga telah memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan bangsa. Berbagai karya alumni dan sivitas akademika UNIMAL dalam bentuk sumbangan

pemikiran seperti pembuatan peraturan/qanun, penulisan karya ilmiah, pengembangan teori-teori dalam kehidupan bermasyarakat, membentuk norma dan etika masyarakat. Dalam bentuk gagasan/desain membuat aplikasi, rancang bangun, prototipe serta konstruksi yang telah dihasilkan dan diterapkan di masyarakat luas. Terakhir adalah berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta mensejahterakan masyarakat secara adil dan beradab.

UNIMAL dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan peluang dan tantangan yang memerlukan tanggapan cepat dan tepat. UNIMAL bertekad memainkan peran sebagai kekuatan intelektual bagi kelahiran masyarakat baru berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 disertai ilmu pengetahuan, teknologi, dan akhlakul karimah.

Sebagai tanggapan terhadap aspirasi pendidikan masyarakat, UNIMAL mewajibkan dirinya untuk memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial UNIMAL. Selain itu, tuntutan dan harapan masyarakat pun semakin meningkat sehingga UNIMAL berkewajiban untuk menghasilkan lulusan dengan mutu yang semakin tinggi serta mampu berdiri setara dalam kompetisi masyarakat dunia, berperan positif dalam penguatan landasan kehidupan keberagamaan, peningkatan kesejahteraan, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong Sumber Daya Manusia Unggul (SDMU) dan menjadikan Indonesia Maju.

Upaya pencapaian tujuan di atas diselaraskan dengan potensi sumber daya UNIMAL, dinamika pasar kerja, dan persaingan global, UNIMAL menetapkan rencana strategis pengembangan jangka menengah UNIMAL dalam Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024.

Agar UNIMAL mampu berkembang tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan dokumen perencanaan strategis yang diyakini mampu mengarahkan alokasi sumber daya secara konsisten, efektif, efisien, dan mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang diharapkan. Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijadikan dasar acuan proses perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran (RA) untuk diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penyusunan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 didasarkan pada upaya untuk mendorong percepatan dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar di bidang pendidikan sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam kerangka otonomi pendidikan. Penyusunan Renstra UNIMAL tahun 2020-2024 didasarkan dan mempertimbangkan kondisi aktual pada saat ini dan harapan ideal kondisi masa depan.



Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi UNIMAL memiliki rencana strategis ke depan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Kedudukan rencana strategis ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi pengelola UNIMAL, dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan dalam visi misi UNIMAL. Sesuai dengan fungsinya maka Renstra UNIMAL disusun secara sungguh-sungguh dengan menyerap seluruh aspirasi yang berkembang (dosen, karyawan, mahasiswa, *stakeholder*, pimpinan universitas dan fakultas, serta masyarakat pengguna) serta memadukannya dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal.

### *B. Tujuan dan Manfaat*

Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan dan pengembangan UNIMAL untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Penyusunan Renstra UNIMAL, yaitu :

- a. Mengenali dan mendeskripsikan isu permasalahan aktual dan strategis bidang layanan tri darma perguruan tinggi;
- b. Mendeskripsikan arah dan sasaran pencapaian layanan tri darma perguruan tinggi;
- c. Mendeskripsikan kebijakan sebagai pilihan strategi dalam upaya pemenuhan bidang layanan tri darma perguruan tinggi;
- d. Mendeskripsikan berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal serta asumsi-asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan layanan tri darma perguruan tinggi;
- e. Mendeskripsikan berbagai pilihan program untuk ditindaklanjuti sebagai program/kegiatan oleh masing-masing fakultas dan unit kerja terkait ke dalam rencana aksi yang lebih operasional.

Terwujudnya Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan acuan dalam;

- a) Penyusunan program kerja para dekan di lingkungan UNIMAL;
- b) Penyusunan program kerja UPT di lingkungan UNIMAL;
- c) Penyusunan Renstra Fakultas, Jurusan/Program Studi di lingkungan UNIMAL;
- d) Penyusunan Program Kerja Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UNIMAL;
- e) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMAL;
- f) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi UNIMAL, untuk keperluan bahan akreditasi;
- g) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi pemerintah (LAKIP) UNIMAL.

### *C. Landasan Hukum*

Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disusun dengan berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 yang bersumber dari hukum/peraturan/kebijakan serta adat istiadat yang

dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh, yang berupa:

- a. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Renstra Kemendikbud Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- j. Statuta UNIMAL Tahun 2006;
- k. Rencana Strategis UNIMAL Tahun 2015-2019.

#### *D. Ruang Lingkup*

Materi yang akan dibahas dalam penyusunan Renstra UNIMAL adalah pemaparan kondisi eksisting kinerja layanan pendidikan, analisis potensi dan tantangan yang harus disikapi dalam pelaksanaan pendidikan, penetapan arah pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi serta tujuan dan pendiskripsian isu strategis, strategi layanan pendidikan mencakup tujuan strategis, sasaran pembangunan, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang sebagai acuan seluruh instansi terkait.

#### *E. Metodologi*

Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan dari unsur di lingkungan UNIMAL dan unit lain yang terkait dikoordinasikan oleh Tim *Task Force*. Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disusun dengan cara dokumentasi, observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh Tim *Task Force* yang dibentuk dengan Surat Keputusan 656/UN45/KPT/20204 tanggal 20 April 2020. Tim *Task Force* tersebut terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Seluruh isi materi Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah profesi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim *Task Force*.

#### *F. Sistematika Pembahasan*

Sistematika penulisan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat, landasan hukum, ruang lingkup, metodologi, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II Visi, Misi dan Tujuan**

Berisi uraian lengkap mengenai visi, misi dan tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2024 dilengkapi dengan tata nilai dan tata kerja untuk menuju UNIMAL hebat 2024.

## **Bab III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelambagaan**

Mencakup pernyataan isu strategis berdasarkan analisis permasalahan dan potensi, tujuan strategis, sasaran UNIMAL, kebijakan UNIMAL berdasarkan faktor pendukung dan kendala dengan mempersiapkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan.

## **BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Berisikan target-target yang akan dicapai dalam rentang waktu yang ditentukan dalam aspek akademik, administrasi dan keuangan serta pendanaan yang dibuat dalam rencana pendanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

## **BAB VI Penutup**

Merupakan uraian penegasan pokok-pokok kebijakan dan program dan harapan agar Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 untuk dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan program secara operasional oleh masing-masing unit terkait.

## **Lampiran**

Lampiran Rencana Strategis UNIMAL berisi Matriks kinerja dan pendanaan berdasarkan sasaran pencapaian mencakup output, outcome, sumber pembiayaan dan penjelasan unit penanggung jawabnya tahun 2020-2024 serta Matriks Kerangka Regulasi.

### 1.2 Profil UNIMAL

#### *A. Letak Geografis, Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi Kabupaten Aceh Utara*

Pusat administrasi kampus UNIMAL berada di kabupaten Aceh Utara, tepatnya di desa Reuleut Timu kecamatan Muara Batu. Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di bagian pantai pesisir utara diantara posisi posisi 96° 47' – 97° 31' Bujur Timur dan 04° 43' – 05° 16' Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara memiliki wilayah seluas 3.296,86 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kota Lhokseumawe
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Bener Meuriah
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Bireuen

Banyaknya desa, kemukiman dan kecamatan dalam wilayah administrasi kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

- a) Banyaknya Desa : 852 Desa

- b) Banyaknya Kelurahan : 2 Kelurahan
- c) Banyaknya Mukim : 70 Kemukiman
- d) Banyaknya Kecamatan : 27 Kecamatan

Kabupaten Aceh Utara memiliki penduduk 619.407 jiwa. Jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 54 sekolah.

### *B. Letak Geografis, Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi Kota Lhokseumawe*

Pu

### *C. Letak Geografis, Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi Kabupaten Pidie*

Pu

### *D. Lokasi Kampus Universitas Malikussaleh (UNIMAL)*

#### 1. Kampus Induk

Kampus Induk UNIMAL (Kampus Cot Tengku Nie Reuleut) berada di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, berjarak lebih kurang 22 Km dari Kota Lhokseumawe (dari arah timur) atau berjarak lebih kurang 38 Km dari Kota Bireuen, Kabupaten Bireuen (dari arah barat). Lahan lokasi kampus tersebut meliputi 4 (empat) buah desa, yaitu: Desa Reuleut Timur, Desa Reuleut Barat, Desa Paya Gaboh dan Desa Cot Kuemuneng, dari jalan negara Banda Aceh - Medan berjarak lebih kurang 1,5 Km ke arah selatan jalan. Untuk menuju ke lokasi kampus dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 30 menit dari kota Lhokseumawe atau dalam waktu lebih kurang 50 menit dari kota Bireuen dengan menggunakan bus angkutan antar kota.

Lahan Kampus di Cot Tengku Nie Reuleut yang dimiliki UNIMAL seluas 84 Hektar, telah bersertifikat. Dalam arah timur - barat (sejajar dengan jalan raya Banda Aceh - Medan) mempunyai panjang lebih kurang 1.880 m dan dalam arah utara - selatan mempunyai panjang lebih kurang 756 m, bentuk lahan yang ada, belekuk-lekuk sangat tidak beraturan.

Kondisi permukaan tanah berbukit, terdapat beberapa bagian lembah yang curam. Sebagian besar (60%) ditumbuhi oleh semak belukar. Di lokasi ini juga terdapat makam ulama pada masa kerajaan Samudera Pase, yaitu makam Teungku Nie Reuleut. Secara umum, tekstur tanah keras berkapur, tidak ditemui sumber air pada permukaan tanah.

Di lokasi kampus ini UNIMAL memiliki beberapa gedung diantaranya:

- Gedung Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- Gedung Biro Administrasi Umum dan Keuangan
- Aula Sultan Malikussaleh
- Perpustakaan UNIMAL
- Klinik UNIMAL
- Rusunawa UNIMAL
- Gedung Administrasi dan Perkuliahan Program Studi Psikologi
- Gedung Administrasi Fakultas Pertanian dan Perkuliahan

- Ruang Kuliah Umum Fakultas Pertanian A
- Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Pertanian
- Rumah Kaca Fakultas Pertanian
- Kebun Percobaan Fakultas Pertanian
- Gedung Administrasi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Perkuliahan
- Ruang Kuliah Umum Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan A
- Ruang Kuliah Umum Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan B
- Gedung Pusat Pembinaan Karakter UNIMAL
- Prasarana Olah Raga

## 2. Kampus Lancang Garam

Pusat Administrasi program studi pascasarjana berada di gedung lama di Jl. Tgk. Cik Ditiro No. 32 Lhokseumawe. Gedung ini dilengkapi dengan 4 (empat) ruang kuliah, ruang baca, ruang diskusi, ruang konsultasi dan ruang dosen. Di halaman depan gedung ini tersedia ruang kelas pascasarjana sebanyak 20 kelas.

Di jalan Samudra Kota Lhokseumawe terdapat Gedung Administrasi dan Perkuliahan Program Studi Arsitektur. Gedung ini terdiri dari ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, ruang rapat, ruang belajar dan ruang untuk shalat.

Luas lahan di kampus Lancang Garam adalah 1.210 m<sup>2</sup>, yang berada di dua (2) jalan yang berbeda. Lokasi kampus Lancang Garam berada di pusat pemerintahan Kota Lhokseumawe, sehingga sangat tepat untuk pusat kegiatan pascasarjana.

## 3. Kampus Uteunkot Cunda

Pusat Administrasi program studi sarjana Kedokteran dan program studi Profesi Dokter berada di gedung bekas Exxon Mobil Oil Indonesia. Kampus ini digunakan untuk kegiatan Fakultas Kedokteran dan kegiatan keramaian lainnya, karena disini ada gedung olah raga. Luas lahan di kampus ini adalah 13.201 m<sup>2</sup>.

Kampus Uteunkot ini menjadi pusat pelayanan administrasi Fakultas kedokteran. Gedung pusat administrasi, ruang kuliah, laboratorium, ruang tutorial, ruang dikusi, ruang baca, mushalla dan GOR ACC Cunda ada di kampus ini.

## 4. Kampus Bukit Indah

Kampus Bukit Indah sebelumnya adalah kompleks perumahan Bukit Indah eks. Exxon Mobil, berada di daerah perbukitan dengan daerah yang terbangun berada di sela-sela perbukitan, kompleks perumahan ini terkesan tersembunyi diantara perbukitan dan rimbunnya pepohonan. Pada tofografi lahan kompleks eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil ini menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan asri. Kondisi nyaman kemungkinan dapat dicapai dengan memanfaatkan elemen-elemen iklim yang ada secara alami seperti kecepatan dan arah angin yang ada.

Untuk kompleks eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil udara segar dapat diperoleh dari hembusan angin laut yang bertiup semilir hampir sama sepanjang hari, sebab kompleks perumahan ini berada tidak terlalu jauh dari garis pantai Selat Malaka berjarak  $\pm 2.000$  meter, disamping memanfaatkan vegetasi yang ada sepanjang kaki-kaki bukit dan dikiri-kanan jalan akan menciptakan lingkungan yang sejuk dan segar. Bangunan dengan konsep bangunan tropis yang dipadupadankan dengan penggunaan bahan-bahan modern. Konsep bangunan tropis terlihat pada bentuk atap perisai dengan jurai-jurai yang dalam, bukaan yang luas yang memanfaatkan *cross ventilasi* bagi penghawaan alami, keberadaan *courtyard* bangunan semakin membawa suasana asri dari luar kedalam rumah.

Kondisi lahan secara umum berbukit-bukit dengan kemiringan lahan yang bervariasi mulai 0% - 30%. Luas total areal 978.308,81 M<sup>2</sup>. Dimana hampir 30%-nya merupakan lahan dengan derajat kemiringan  $\geq 15\%$  seluas  $\pm 293.000$  M<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan seperti ini merupakan lahan yang tidak terbangun dan dimanfaatkan sebagai kawasan hijau, sedangkan sisanya adalah lahan yang sudah terbangun dan lahan kosong yang dapat dikembangkan.

Bangunan yang ada sesuai dengan fungsinya secara umum adalah bangunan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa tipe, beberapa bangunan fasilitas umum seperti bangunan sekolah, mushalla, klinik kesehatan serta fasilitas olah raga seperti lapangan tenis, lapangan soft ball, lapangan bola kaki, serta fasilitas rekreasi lainnya. Adapun bangunan tipe-tipe bangunan yang ada sebagai berikut:

- Tipe I House = 31 unit, luas  $\pm 296$  M<sup>2</sup>/bangunan
  - Tipe II House = 20 unit, luas  $\pm 161$  M<sup>2</sup>/bangunan
  - Tipe III House = 21 unit, luas  $\pm 137$  M<sup>2</sup>/bangunan
  - Town House Class II = 4 unit, luas  $\pm 152$  M<sup>2</sup>/bangunan
  - Town House Class III = 4 unit, luas  $\pm 137$  M<sup>2</sup>/bangunan
  - International School dengan luas  $\pm 500$  M<sup>2</sup>
  - Mushalla dengan luas  $\pm 200$  M<sup>2</sup>
  - Recreation area dengan luas  $\pm 1.000$  M<sup>2</sup>
  - Fasilitas olah raga  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup>

Sarana penghubung didalam kompleks eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil berupa jalan perkerasan aspal beton sepanjang  $\pm 2.000$  M<sup>1</sup>, dengan memiliki pola jalan linier yang menyebar mengikuti pola kontur lahan yang berbukit. Pola linier membentuk dua cabang jalan utama atau jalan primer, setiap cabang jalan primer yaitu jalan Sumatera dan Jawa, dimana masing-masing jalan Sumatera memiliki tiga buah jalan sekunder yaitu jalan Kalimantan, jalan Batam, dan jalan Sumatera itu sendiri, sedangkan jalan Jawa memiliki empat buah jalan sekunder yaitu jalan Sulawesi, jalan Bali, jalan Irian, dan jalan Jawa.

Melihat dari hierarkinya jalan Sumatera dan jalan Jawa merupakan jalan primer sedangkan jalan Kalimantan, jalan Batam, jalan Sulawesi, Jalan Bali, dan jalan Irian merupakan jalan sekunder.

Pola masa bangunan eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil mengikuti pada jalan yang ada, dengan bangunan mengisi sisi kiri dan sisi kanan bagian jalan sekunder. Dengan pola tata ruang eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil yang demikian dianggap ideal untuk dialih fungsikan menjadi kampus sebuah universitas.

Dari tingkat kenyamanan bangunan dan lingkungan yang asri pada eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil merupakan suasana yang mutlak dibutuhkan bagi kelancaran proses belajar dan mengajar. Pola jalan linier yang menyebar menjadikan pengelompokan masa-masa bangunan menjadi tujuh kelompok bangunan yang dihubungkan oleh jalan-jalan sekunder dengan jumlah bangunan yang variatif dengan tipe-tipe yang beragam disetiap kelompoknya.

Dari beberapa aspek yang ada seperti aspek tata ruang yang berkaitan dengan jumlah bangunan dan besaran-besaran ruang yang cukup besar dan aspek Fisika bangunan secara analisis lingkungan makro dapat memanfaatkan elemen-elemen iklim yang positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan asri eks perumahan Bukit Indah Exxon Mobil sangat memungkinkan untuk dialihkan menjadi kampus. Jumlah 48 unit bangunan yang cukup banyak dengan besaran ruang yang cukup besar mulai dari 210 M<sup>2</sup> – 650 M<sup>2</sup> sehingga dapat lebih fleksibel untuk mengalihkan fungsinya menjadi ruang-ruang kuliah maupun bagi ruang-ruang kantor serta sarana-sarana pendukung lainnya. Kondisi lingkungan yang nyaman dan asri sangat ideal untuk dijadikan sebagai sebuah kampus, sebab iklim akademis sangat membutuhkannya.

Sedangkan pola bangunan yang menyebar tidak menjadikan suatu masalah dalam penggunaannya, bahkan mencerminkan taxonomi ilmu pengetahuan yang diajarkan di sebuah perguruan tinggi. Pengelompokan bangunan-bangunan yang mengikuti pola linier jalan bahkan menjadikan lebih mudah membentuk sebuah fakultas dengan kelompok bangunan yang ada.

Saat ini kampus Bukit Indah digunakan untuk sebagian besar kegiatan UNIMAL. Dilokasi kampus ini sekarang menjadi pusat kegiatan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa juga menggunakan kampus ini, sebagai pusat kegiatan harian mereka. Hal ini didukung oleh kesediaan sarana dan prasarana yang memadai ditambah lagi alam lingkungannya asri.

Kampus Bukit Indah dipakai sebagai pusat pelayanan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Selain sebagai pusat pelayanan fakultas, juga sebagai pusat Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM). Satuan Pengawas Internal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Badan Jaminan Mutu, Pusat Bahasa, Pusat Komputer, UNIMAL Press, UPT Bimbingan Karier dan Kewirausahaan, UPT Inovasi dan Inkubator Bisnis, Project AKSI ADB, Migas Centre, Marine Centre, dan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (mitra LTMPPT).

Kampus Bukit Indah juga sudah memiliki Gedung baru berupa 6 unit Gedung laboratorium dan ruang kuliah serta ruang administrasi lainnya dengan luasnya  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ /bangunan. Selain itu kampus ini juga sudah dilengkapi dengan Aula Cut Mutia, RKU A dan Gedung Olah Raga.

#### E. Sejarah Universitas Malikussaleh (UNIMAL)

UNIMAL didirikan dengan mengambil nama besar Raja Samudera Pasai pertama. Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Selanjutnya menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga, merupakan pusat pengembangan Pendidikan Islam dan Agama Islam itu sendiri, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah melahirkan sejumlah Syech (Guru Besar) dan ilmuwan lainnya. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan (*Welfare State*) atau "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*" suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang Diridhai Allah SWT, di bumi "Serambi Mekkah".

Sultan Malikussaleh bukan saja telah mampu meletakkan dasar yang kokoh pada masanya, bahkan pondasi yang pernah ia tegakkan telah mewarnai watak dan spirit bangsa ini hingga sekarang. Meskipun di Aceh Kerajaan Samudera Pasai telah lenyap dan Malikussaleh juga telah wafat, namun semangat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya masih tetap terukir di sanubari dan menjadi pendorong perjuangan bangsa ini.

Latar belakang sejarah yang dijiwai oleh semangat itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi generasi penerus yang dihasilkan oleh UNIMAL. Didukung oleh sumber daya yang sangat potensial, UNIMAL diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan daerah Aceh pada khususnya.

Sebagai cikal bakal, UNIMAL bermula dari menjelmannya Akademi Ilmu Agama jurusan Syariah yang didirikan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1969, 12 Juni 1969, pada masa Bupati Drs. Tgk. Abdul Wahab Dahlawy. Selanjutnya pada 15 September 1970 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1970 Akademi Ilmu Agama (AIA) dilengkapi juga dengan jurusan Ilmu Politik.

Dengan Akte Notaris Nomor: 15 tertanggal 17 Juli 1971 dibentuk pula Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YPTI) sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Akademi Ilmu Agama. Kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nomor : 001/YPTI/1971, 1 Agustus 1971, Akademi Ilmu Agama diubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan jurusan Akademi Syariah, Akademi Ilmu Politik, Akademi Tarbiyah, serta jurusan Dayah Tinggi/Pesantren Luhur. Perguruan Tinggi Islam ini mengalami perubahan nama lagi menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (disingkat dengan sebutan PERTIM), melalui Surat Keputusan Yayasan



Perguruan Tinggi Islam pada 24 Mei 1972. Tahun 1980 berubah menjadi Yayasan Universitas Malikussaleh dengan singkatan UNIMA.

Perjalanan panjang dan melalui proses yang rumit pula, akhirnya pada 18 Juli 1984 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0607/0/1984 Sekolah Tinggi Administrasi Negara memperoleh Status Terdaftar. Sedangkan Sekolah Teknik mendapat giliran status terdaftar tepatnya 24 Agustus 1984, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0392/0/1984. Selanjutnya tahun 1986 didirikan pula Fakultas Pertanian, Ekonomi, Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0584/0/1989, 11 September 1989 kembali UNIMAL berintegrasi dalam Fakultas Ilmu Administrasi, Teknik, Pertanian, Ekonomi, Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hanya saja Manajemen, Bisnis, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum, serta Agronomi yang ada.

Kondisi politik di Aceh yang ditandai oleh konflik berkepanjangan telah menimbulkan dampak serius dan mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. Pengaruh negatif tersebut diantaranya, berupa kehilangan harkat dan martabat, degradasi nilai-nilai sosial yang semakin memprihatinkan dan bahkan menjauhkan dari suasana masyarakat madani (*Civil Society*). Hal ini akan terus berlanjut, apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penyelesaian yang konkret dan komprehensif, maka dapat menimbulkan ancaman terjadinya disintegrasi bangsa.

Membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat yang berkesinambungan dalam suasana masyarakat madani diperlukan usaha konkret untuk melahirkan sebuah Universitas Negeri Kedua setelah Universitas Syiah Kuala, yang merupakan dambaan masyarakat Samudera Pasai khususnya dan masyarakat Aceh umumnya.

Upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik, mengingat wilayah Samudera Pasai yang terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Sebagian wilayah ini merupakan daerah pusat konflik paling bergolak, serta paling intensif menentang Pemerintah Pusat sebagai akibat dari ketidakadilan dan kekeliruan kebijakan di masa lalu. Di samping itu, di wilayah tersebut juga memiliki deposit sumber daya alam sangat kaya dan dapat diolah bagi kemakmuran masyarakat.

Menteri Pendidikan Nasional melalui keputusan Nomor: 216/P/2000, 16 November 2000 membentuk Tim Persiapan Perubahan Status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), selanjutnya disingkat Tim Persiapan. Tim ini bertugas mempersiapkan pelaksanaan pendirian Universitas Negeri Malikussaleh Lhokseumawe secara bertahap sampai

terpenuhinya seluruh persyaratan. Proses pendirian menjadi universitas negeri telah dan akan terus mengikuti aturan-aturan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 004/D/T/ 2001, 2 Januari 2001 kepada Rektor UNIMAL mengenai surat Dirjen Pendidikan Tinggi kepada Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3458/D/T/2000, 2 Oktober 2000 tentang kesiapan UNIMAL menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapat disposisi Menteri Pendidikan Nasional No. 6015/TUM/2000, 21 Desember 2000.

Dirjen Pendidikan Tinggi dengan surat No. 1252/D/T/2001, 24 April 2001 mempertanyakan kepastian status UNIMAL apakah milik masyarakat Aceh Utara dan dibiayai dengan APBD atau milik pemerintah dan dibiayai dengan APBN. Sekiranya tetap diproses penegeriannya maka Peraturan Daerah Nomor: 26 Tahun 1999 otomatis akan gugur setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang Penetapan UNIMAL sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

Menjawab surat Dirjen Pendidikan Tinggi mengenai status pengurusan Penegerian UNIMAL, maka Rektor UNIMAL dengan surat Nomor: 540/UNIMA/H/2001, 28 April 2001, menjelaskan bahwa program penegerian UNIMAL adalah suatu aspirasi dan permintaan masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Hal ini salah satunya ditujukan pada upaya penyelesaian konflik Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bermaksud bahwa dengan modal dasar dari milik masyarakat Aceh Utara dapat diupayakan pengembangannya oleh pemerintah pusat untuk penegeriannya, serta menyerahkan sepenuhnya menjadi milik pemerintah pusat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I.

Berkenaan dengan penetapan status UNIMAL sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor : 1620/D/T/2001, pada 8 Mei 2001. hal itu, berdasarkan pertimbangan antara lain, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 216/P/2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian UNIMAL tertanggal 16 November 2001. Karenanya menjadi dasar yang kuat untuk proses penetapan status tersebut. Keputusan ini mengandung maksud bahwa persiapan penegerian dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh item-item yang disyaratkan. Lebih lanjut, Dirjen Pendidikan Tinggi telah melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut antara lain mengalokasikan anggaran pembangunan untuk peningkatan kualitas pembelajaran mulai tahun anggaran 2001.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 264/MPN/ 2001, 14 Mei 2001 yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, menyampaikan usulan penetapan status UNIMAL sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui surat Keputusan Presiden. Dasar pertimbangannya adalah sebagai tindak lanjut dari Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 216/P/2000, 16 November 2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian UNIMAL.

Secara menyeluruh persyaratan akademik yang dimiliki Universitas Malikussaleh telah mendekati persyaratan sebuah perguruan tinggi negeri, sedangkan kekurangan yang ada (seperti peningkatan status program studi) dapat diatasi secara bertahap mulai tahun anggaran 2002. Secara administratif, masih diperlukan beberapa proses untuk penetapan status negeri yaitu : 1) pengalihan aset dari Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Pemerintah Pusat; dan 2) pengalihan status Pegawai Swasta menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor: 170/M.PAN/7/2001, 4 Juli 2001 kepada Menteri Pendidikan Nasional menyarankan, penetapan UNIMAL menjadi Perguruan Tinggi Negeri seyogyanya dilakukan persiapan pendirian terlebih dahulu yang penetapannya diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya pendirian UNIMAL akan diproses penetapannya melalui Keputusan Presiden setelah langkah/tahapan persiapan dimantapkan dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan negara serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Rektor UNIMAL melalui surat Nomor 367/UNIMA.H/2001, 6 Juli 2001 mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar pendirian UNIMAL sebagai Perguruan Tinggi Negeri dapat diusulkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden untuk penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya. Demikian pula diikuti dengan surat Nomor: 368/UNIMA.H/2001, pada 7 Juli 2001 yang ditujukan langsung kepada Presiden R.I untuk penetapannya.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor: 71100/ MPN/2001, 18 Juli 2001 mengajukan permohonan kepada Presiden R.I untuk penetapan UNIMAL sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa UNIMAL telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan hal di atas dan khususnya memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, permohonan ditujukan kepada Presiden untuk dapat menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penetapan UNIMAL sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

Rektor UNIMAL menyampaikan surat dengan Nomor 371/UNIMA.H/2001, 30 Juli 2001 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Intinya menyampaikan Aspirasi Rakyat Aceh untuk menetapkan UNIMAL yang berkedudukan di Lhokseumawe – Aceh Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya.

Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status UNIMAL yakni ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001, mengenai Penegerian UNIMAL.

Dengan dinegerikannya UNIMAL berarti di provinsi Aceh yang berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa tersebut sudah memiliki dua universitas negeri, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh dan UNIMAL di Lhokseumawe, Aceh Utara, serta satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh.

Pendirian dan pengembangan UNIMAL telah dimulai sejak tahun 1969. Pengembangannya telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali untuk mengadakan penyesuaian dengan penetapan jurusan-jurusannya, perubahan nama, serta peningkatan statusnya. Akhirnya, dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari Sabtu, 8 September 2001 di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan Pendirian UNIMAL sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Masyarakat Aceh, semoga Allah Swt meridhai upaya kita bersama dalam mencerdaskan bangsa.

#### *F. Susunan Organisasi Universitas Malikussaleh (UNIMAL)*

Sesuai dengan Statuta Universitas Malikussaleh No.36 Tahun 2006 dan usulan statuta baru susunan organisasi UNIMAL terdiri atas:

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| a) Unsur Pimpinan               | : | Rektor dan Pembantu Rektor   |
| b) Unsur Pimpinan Fakultas      | : | Dekan dan Pembantu Dekan   |
| c) Unsur Pertimbangan           | : | Senat  |
| d) Unsur Pengawasan             | : | Satuan Pengawas Internal   |
| e) Satuan Pengawas Internal     | : | Satuan Pengawas Internal   |
| f) Unsur Pelaksana Akademik     | : | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Badan Jaminan Mutu   |
| g) Unsur Pelaksana Administrasi | : | Biro Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum dan Keuangan  |
| h) Unsur Tenaga Pengajar        | : | Dosen dan Teknisi  |
| i) Unsur Pelaksana Teknis       | : | Perencanaan, Humas dan Hubungan Eksternal, Perpustakaan, Pusat Komputer, Pusat Bahasa, Klinik Kesehatan, Bimbingan Karier dan Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis, Unimal Press, Migas Centre dan Marine Centre serta Project Aksi ADB |
| j) Dewan Penyantun              | : | Gubernur, Bupati Aceh Utara dan Tokoh lainnya yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor  |

### 1.3 Kondisi Umum Periode 2015-2019 UNIMAL

Dalam era kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan di era globalisasi dunia pendidikan saat ini, proses penyelenggaraan pendidikan di UNIMAL tidak bisa menghindari dari menghadapi berbagai persaingan secara terbuka. Oleh karena itu UNIMAL harus mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Kondisi UNIMAL dalam rentang waktu 2015-2019 telah mampu mengikuti perkembangan zaman pada saat itu dan terus berbenah diri untuk menghadapi masa depan yang memiliki tantangan lebih berat. Kondisi umum UNIMAL periode 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### *A. Pemerataan Pendidikan*

Dalam upaya mewujudkan arahan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2015-2019) sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia, UNIMAL terus memfasilitasi calon mahasiswa mendapatkan akses Pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Khususnya untuk mendukung program afirmasi anak-anak yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang). UNIMAL terus menerima mahasiswa mulai tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019. UNIMAL sangat membuka diri untuk menerima mahasiswa tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Kampus UNIMAL adalah miniatur Indonesia. Di sini diajarkan adat istiadat, budaya bangsa, toleransi, dan kemajemukan bangsa.

UNIMAL memiliki mahasiswa yang berasal dari Papua, Papua Barat, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Jumlah mahasiswa UNIMAL Tahun 2019 adalah 19.267 orang, aktif kuliah semester genap tahun ajaran 2019-2020 adalah 15.967 dan yang cuti kuliah adalah 51 orang. Mahasiswa yang berasal dari luar Aceh sebanyak 5.377 orang atau setara dengan 34% dari mahasiswa UNIMAL yang aktif. Data ini adalah sesuatu yang menggembirakan, karena asas pemerataan Pendidikan sudah dapat dirasakan di kampus paru-paru rakyat Aceh ini.

#### *B. Mahasiswa dan Lulusan*

Mahasiswa UNIMAL berasal dari berbagai Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh tanah air. Sistem penerimaan mahasiswa UNIMAL mengikuti jalur penerimaan secara nasional. Seleksi nasional melalui SNMPTN dengan proporsi mencapai 45% dari daya tampung yang ada. Selanjutnya dari jalur SBMPTN dengan proporsi 45% dari daya tampung dan 10% dari daya tampung dari jalur SMM-PTN Wilayah Barat, sedangkan jalur prestasi dibatasi hanya untuk maksimal 30 orang saja. Seleksi secara lokal dilakukan hanya untuk program studi Magister, Diploma III dan program studi yang baru dikeluarkan izin operasionalnya.

Penerimaan mahasiswa secara nasional 100% untuk program sarjana melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN Wilayah Barat membuka peluang diterimanya mahasiswa dengan kualitas yang baik dari berbagai daerah. UNIMAL juga masih dapat meningkatkan daya tampung seiring perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Porsi beasiswa yang dikelola UNIMAL juga relatif meningkat setiap tahunnya dan masih ada beberapa program studi yang tidak terisi penuh. Jumlah mahasiswa yang *drop out* (DO) semakin berkurang dengan masa studi mahasiswa dan masa tunggu lulusan semakin pendek.

Kelemahan yang masih dimiliki oleh mahasiswa UNIMAL adalah kurangnya kompetisi di antara mereka yang mungkin saja disebabkan oleh sebahagian besar mahasiswa berasal dari sekolah-sekolah sekitar kampus yang tidak serius melanjutkan pendidikan tinggi. Mahasiswa yang diterima berasal dari luar Aceh belum > 50% hal ini mengidentifikasikan bahwa UNIMAL belum menjadi universitas favorit di luar Aceh. Kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa UNIMAL masih bersifat pengembangan minat dan bakat saja, sedangkan yang sifatnya kompetisi keilmuan belum begitu banyak.

Banyak alumni yang sudah menduduki posisi strategis di pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta di dalam maupun luar negeri. Banyak alumni yang telah menduduki berbagai jabatan strategis juga berperan aktif dalam pengembangan UNIMAL melalui Ikatan Alumni UNIMAL.

Pelacakan dan perekaman data lulusan belum menjangkau semua alumni yang berkiprah di luar negeri. Hal ini disebabkan komunikasi dengan alumni di luar negeri masih kurang efektif. Masih kurang minat para alumni untuk menjadi penggerak roda ekonomi kerakyatan masyarakat di tengah-tengah masyarakat khususnya di Aceh dan semakin ketatnya persaingan antara alumni dalam merebut pasar kerja.

Daya tampung untuk Tahun Akademik 2019/2020 adalah sebanyak 5.475 orang yang diterima dan membayar Uang Kuliah Tunggal hanya 3.657 orang. Daya tampung untuk Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebanyak 6.300 orang dan yang sudah diterima lewat jalur SNMPTN sebanyak 2.650 orang. Mahasiswa UNIMAL untuk semester genap Tahun Akademik 2019/2020 berjumlah 19.267 orang, yang aktif 15.967 orang, cuti 51 orang, non aktif 3.249 orang dan yang lulus jalur SNMPTN Tahun Akademik 2020/2021 adalah 2.650 orang.

Setiap tahun UNIMAL menghasilkan lulusan hampir 3.500 mahasiswa dari 2 program Diploma III, 33 program sarjana, 1 program profesi dan 10 program pascasarjana. UNIMAL melaksanakan wisuda 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

### *C. Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia yang dimiliki UNIMAL saat ini cukup memadai, sehingga menjadi modal yang besar untuk UNIMAL meningkatkan kualitas pendidikannya. Jumlah sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan terus meningkatkan kemampuannya baik dengan melanjutkan pendidikan formal maupun mengikuti pelatihan-pelatihan

lainnya.

Jumlah dan kualitas dosen tetap terbagi secara merata pada setiap program studi dengan kompetensi pada masing-masing keahliannya. Proses penerimaan dosen tetap dan tenaga kependidikan dilakukan secara nasional melalui Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2015-2019) sekarang Kemendikbud, sehingga diperoleh calon dosen dan calon tenaga kependidikan dengan kualitas yang sama secara nasional. Rekrutmen dosen honorer dan dosen luar biasa dilakukan langsung oleh UNIMAL dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Rektor, sehingga diperoleh dosen yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Saat ini jumlah dosen yang mengikuti program doctoral di dalam dan luar negeri juga meningkat.

UNIMAL mempunyai peluang untuk memperoleh sumber daya manusia sebagai dosen, laboran maupun staf dengan standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Semakin banyaknya sumber beasiswa yang ada, baik berasal dari pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga asing untuk program doctoral. Masih cukup banyak beasiswa dari pemerintah yang tidak terserap untuk pendidikan lanjut setiap tahunnya. Bertambah secara signifikan dosen yang sudah menyelesaikan pendidikan doctoral (mencapai 27% dari dosen PNS). Adanya sertifikasi dosen setiap tahun yang diikuti dengan evaluasi kinerja dosen untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen.

Sumber daya manusia yang dimiliki UNIMAL masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan dan peningkatan seperti tidak berjalan dengan baik proses *reward* dan *punishment* serta masih kurangnya tanggung jawab dosen dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa orang dosen masih bertempat tinggal di daerah yang berjarak > 60 km dari lokasi kampus yang mengakibatkan kurang efektif dalam proses pengajaran dan penelitian.

Jumlah dosen yang bergelar doctoral belum mencapai angka ideal 30% dari total dosen. Selanjutnya dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala juga masih belum merata di semua program studi. Begitu juga dengan jabatan akademik profesor masih sangat terbatas, hanya terdapat tiga orang, dan belum merata di semua fakultas. Masih ada dosen-dosen yang melakukan kegiatan di luar mengajar yang mengakibatkan mengurangi kinerja dosen dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah tenaga administrasi, teknisi, laboran, pustakawan belum memadai. Sistem rekrutmen CPNS (dosen, laboran, dan staf) yang semakin sulit dan formasi yang terbatas.

UNIMAL saat ini memiliki dosen sebanyak 687 orang dengan status Dosen PNS/CPNS, Dosen Tetap non PNS, dan Dosen Luar Biasa. Dosen PNS/CPNS sebanyak 519 orang dengan jenjang pendidikan magister, spesialis 1, spesialis 2 dan doktor. Dosen Tetap non PNS sebanyak 91 orang bergelar magister. Dosen Luar Biasa berjumlah 77 orang dengan gelar magister dan profesi dokter. Jumlah dosen yang sudah tersertifikasi profesional adalah 435 orang dan sisanya belum tersertifikasi.

Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 474 Orang dengan status PNS/CPNS dan Pegawai Kontrak, yang tersebar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Badan Jaminan Mutu, Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis.

#### *D. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Jaminan Mutu*

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan jaminan mutu yang dijalankan UNIMAL menganut sistem transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan. UNIMAL mempunyai suatu badan normatif (Badan Pertimbangan dan Kebijakan Akademik) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan kebijakan akademik tertentu yang dilakukan unsur pimpinan yang disebut Senat Universitas maupun Senat Fakultas.

Pimpinan UNIMAL terdiri atas Rektor yang dibantu oleh 4 (empat) Pembantu Rektor yang meliputi Pembantu Rektor I (Bidang Akademik), Pembantu Rektor II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Pembantu Rektor III (Bidang Kemahasiswaan,) dan Pembantu Rektor IV (Bidang Informasi dan Kerja Sama). Serta dibantu oleh bagian administrasi (Kepala Tata Usaha, Ka Sub Bagian, karyawan administrasi dan laboran) yang mempunyai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat pada hampir seluruh unsur sivitas akademika.

UNIMAL senantiasa menginformasikan seluruh data akademik, kemahasiswaan, dan administrasi melalui rapat pleno di tingkat universitas dengan mengundang seluruh unsur pimpinan, fakultas, biro, unit pelaksana teknis dan SPI. Sehingga semua informasi dapat diketahui oleh seluruh sivitas akademika UNIMAL. Akuntabilitas UNIMAL dapat dibuktikan dengan kesiapan untuk diaudit setiap saat baik materi akademik maupun administrasi.

Penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi seluruh sivitas akademika di UNIMAL wajib dilaksanakan untuk dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Penghargaan dosen yang berperan aktif dalam kegiatan akademik dan publikasi skala nasional/internasional berupa pengajuan insentif ke universitas.

Pengangkatan Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala UPT, Kepala Pusat Studi, Kepala Biro dan Ketua SPI diatur dalam statuta UNIMAL dan Peraturan Rektor. Setiap pimpinan wajib memiliki dan mempunyai komitmen, dedikasi, loyalitas serta tanggung jawab yang tinggi terhadap pengembangan dan kemajuan UNIMAL.

Unimal terus membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, institusi lain, industri dan dunia usaha secara nasional dan internasional dalam rangka *bench marking*. Adanya pelimpahan pengelolaan keuangan dari universitas ke fakultas dan unit kerja, sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi setiap fakultas, program studi, dan unit kerja untuk menyusun rencana kerja agar dapat melakukan peningkatan kualitas



pelayanan.

Masih perlunya penyempurnaan sistem *data base* untuk memperoleh data yang akurat. Beberapa program tidak konsisten dengan Renstra yang ada. Pengembangan dan pengelolaan organisasi dan manajemen bisa lebih diperbaiki, diantaranya sistem dan prosedur yang berlaku masih sedikit dan tumpang tindih antara tugas dan wewenang.

Ancaman dari tata pamong kepemimpinan, sistem pengelolaan dan jaminan mutu, diantaranya adalah belum optimalnya pelayanan akademik dan administrasi, mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat dan mahasiswa.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Malikussaleh bertujuan untuk memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di UNIMAL dalam rangka meningkatkan kualitas akademik meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan non-akademik antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama yang keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.

Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan nonakademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.

Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan UNIMAL yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

Pelaksanaan SPMI di UNIMAL dapat dipakai sebagai dasar (*baseline*) untuk menuju *benchmarking*, audit mutu akademik eksternal dan akreditasi baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional.

#### *E. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik*

Proses penggunaan kurikulum di UNIMAL mengikuti kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan penguatan kompetensi masing-masing program studi. Untuk Tahun Akademik 2020/2021 UNIMAL akan menggunakan kurikulum yang mengakomodir Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kurikulum setiap program studi 80% adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan 20% merupakan kurikulum lokal guna mendukung kearifan lokal. Beberapa program studi sudah mulai mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada ABET (*Accreditation Board for Engineering and Technology USA*) dan berbasis kompetensi. Rancangan dan proses serta penggunaan hasil evaluasi pembelajaran umumnya telah berjalan baik serta telah dibuat kebijakan untuk mendukung suasana akademik yang kondusif.

Kurikulum pembelajaran dan suasana akademik masih mempunyai

peluang untuk ditingkatkan, karena dunia usaha dan industri membutuhkan lulusan dengan kemampuan akademik yang tinggi dengan riset yang sesuai keahliannya. Kurikulum dengan muatan lokal yang dapat memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi masyarakat sekitar dengan keahlian tertentu.

Kemudahan mengakses informasi kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik dari UNIMAL dengan adanya kuliah online melalui e-learning UNIMAL dan juga semua informasi dapat diakses melalui website [www.unimal.ac.id](http://www.unimal.ac.id). Suasana akademik yang mendukung peningkatan mutu akademik dengan lokasi kampus yang asri dan jauh dari hiruk pikuk kendaraan bermotor.

Untuk mendukung pelaksanaan MBKM, UNIMAL memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) mata kuliah di luar kampus ataupun di luar program studi pilihannya. Mata kuliah di luar kampus dalam 2 (dua) semester (setara dengan 40 sks), dapat ditambah lagi dengan mata kuliah dalam 1 (satu) semester (setara 20 sks) di program studi pilihannya di UNIMAL. Dengan kata lain sks yang wajib diambil di program studi pilihannya adalah sebanyak 5 (lima) semester dari total semester yang harus dijalankan. Program ini tidak berlaku bagi program studi kesehatan.

Perubahan definisi setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan oleh program studi. Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester tersebut, dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program yang disetujui oleh Rektor.

Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar UNIMAL adalah magang/kerja praktek di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan (*start up*) yang tetap dibimbing oleh dosen.

Proyek di desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa, BUMDes, Koperasi atau organisasi desa lainnya.

Mengajar di sekolah adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun desa terpencil yang difasilitasi oleh Kemendikbud Republik Indonesia.

Pertukaran pelajar adalah mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan oleh Pemerintah ataupun UNIMAL.

Penelitian atau riset adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Riset ini dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan mahasiswa yang mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kegiatan ini wajib dibimbing oleh dosen.

Studi/proyek independen adalah di mana mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lainnya. Kegiatan ini wajib dibimbing oleh seorang dosen.

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh UNIMAL, baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya organisasi formal yang dapat disetujui Rektor, Palang Merah Indonesia, Mercy Corps dan lain sebagainya.

#### *F. Akreditasi*

Dari tahun ke tahun, Kemendikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan universitas dijalankan oleh dua badan yang berbeda yaitu BAN PT dan LAM PT. Ada terjadi sedikit penurunan akreditasi dari keseluruhan program studi, akibat dari bertambahnya izin operasional program studi baru.

Akreditasi UNIMAL masih kategori baik (B), ada peningkatan akreditasi Program Studi Sarjana Manajemen yang sudah kategori unggul (A). Ada program studi yang sudah sangat baik pelayanannya, tetapi belum di visitasi. Program studi ini diharapkan dari hasil visitasi nantinya dapat dikategorikan akreditasi unggul (A).

Capaian akreditasi pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik akreditasi B, Sosiologi akreditasi B, Ilmu Politik akreditasi B, Ilmu Komunikasi akreditasi B, Antropologi akreditasi B, Ilmu Administrasi Bisnis akreditasi C, Magister Administrasi Publik akreditasi B dan Magister Sosiologi akreditasi B.

Pada Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum akreditasi B dan Magister Magister Ilmu Hukum akreditasi B. Program studi Ilmu Hukum, akan segera melakukan reakreditasi untuk meraih akreditasi unggul.

Program studi di Fakultas Ekonomi terdiri dari akreditasi A, B dan C. Program Diploma Pendidikan Kesekretariatan (PDPK) akreditasi C, Program Studi Manajemen akreditasi A, Ekonomi Pembangunan akreditasi B, Akuntansi akreditasi B, Ekonomi Syariah akreditasi C, Kewirausahaan akreditasi minimal C Magister Manajemen akreditasi B dan Magister Ekonomi Pembangunan akreditasi minimal C.

Fakultas Teknik sebagai fakultas terbesar memiliki 10 (sepuluh) program studi sarjana dan 3 (tiga) program magister. Program studi Teknik Sipil akreditasi B, Teknik Mesin akreditasi B, Teknik Industri akreditasi B, Teknik Kimia akreditasi B, Teknik Elektro akreditasi B, Teknik

Informatika akreditasi B, Arsitektur akreditasi B, Sistem Informasi akreditasi B, Teknik Material akreditasi minimal C dan Teknik Logistik akreditasi minimal C. Program studi Magister Teknik Energi Terbarukan akreditasi minimal C, Magister Teknik Sipil akreditasi minimal C dan Magister Teknologi Informasi akreditasi minimal C.

Akreditasi pada program studi Fakultas Pertanian meliputi program studi Agroekoteknologi terakreditasi B, Agribisnis terakreditasi B, Akuakultur terakreditasi B dan Ilmu Kelautan terakreditasi minimal C. Pada program studi Magister Agroekoteknologi akreditasi C dan Magister Agribisnis terakreditasi minimal C.

Pada Fakultas Kedokteran akreditasi Diploma III Akademi Keperawatan terakreditasi C, program studi Psikologi terakreditasi minimal C, program studi sarjana Kedokteran terakreditasi B dan program studi Profesi Dokter terakreditasi B.

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terdiri dari program studi Pendidikan Matematika terakreditasi C, Pendidikan Fisika terakreditasi C, Pendidikan Kimia akreditasi minimal C, Pendidikan Bahasa Indonesia terakreditasi C dan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin terakreditasi minimal C.

Capaian program studi terakreditasi minimal B pada semester genap Tahun Akademik 2019/2020 sebesar 56,52% (lima puluh enam koma lima puluh dua persen) dari 46 (empat puluh enam) total program studi.

Program studi terakreditasi minimal B semester genap Tahun Akademik 2019/2020 pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sebesar 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen). Fakultas Hukum sebesar 100% (seratus persen), Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebesar 50,00% (lima puluh persen), Fakultas Teknik 61,54% (enam puluh satu koma lima puluh empat persen), Fakultas Pertanian sebesar 50,00% (lima puluh persen), Fakultas Kedokteran sebesar 50,00% (lima puluh persen), Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan sebesar 40,00% (empat puluh persen).

Capaian program studi terakreditasi minimal B pada semester genap Tahun Akademik 2019/2020 untuk jenjang Diploma III belum ada (0%), jenjang sarjana sebesar 63,64% (enam puluh tiga koma enam puluh empat persen), jenjang pascasarjana sebesar 40,00% (empat puluh persen) dan jenjang profesi 100% (seratus persen).

#### *G. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi*

Sisi pembiayaan untuk sarana dan prasarana serta sistem informasi bersumber dari APBN, APBA Aceh, PNPB UNIMAL dan sumber-sumber hibah lainnya. Dalam tahun 2019 – 2023 mendapat pembiayaan dari “Project AKSI” yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB).

#### *H. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Kerjasama*

UNIMAL telah banyak melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. Memiliki dosen dari berbagai ilmu yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana

yang bersumber dari Hibah DIKTI, Pemerintah Aceh dan penelitian yang bersumber dari instansi lainnya. Banyak dosen melakukan publikasi karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional, ditunjang dengan peningkatan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. Meningkatnya diversifikasi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri akan produk teknologi inovatif. Pengembangan ekonomi, teknologi dan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan dukungan pemikiran dan perencanaan dari akademisi yang ilmiah dan profesional.

### 1. Penguatan Karakter

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan kampus dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiusitas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Skema Penguatan Pendidikan Karakter



Sumber: [https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page\\_id=132](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132)

### 1.4 Permasalahan yang Masih Dihadapi

Dalam durasi tahun 2015 – 2019 UNIMAL sudah banyak terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pelayanan dan pembangunan. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemerataan Pendidikan, Prestasi Mahasiswa, Penambahan Program Studi, Peningkatan Penelitian, Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kerja Sama, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perbaikan Sistem Informasi.

Sampai saat ini UNIMAL masih memiliki sejumlah permasalahan dalam upaya UNIMAL memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan tersebut terbagi dalam 5 (lima) kategori: (A) Pendidikan, (B) Penelitian, (C) Pengabdian kepada Masyarakat, (D) Administrasi Umum, Keuangan, Tata Kelola, Birokrasi dan Aset, serta (E) Sistem Informasi, Perencanaan dan Kerja Sama.

## *A. Pendidikan*

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan, di mana terjadi pewarisan ilmu untuk dapat dipahami dan diterapkan, bahkan dapat mengembangkan dan menciptakan suatu ilmu untuk meningkatkan kualitas yang berguna bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya suatu kesadaran bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa semakin dapat dirasakan. Setiap warga negara diharapkan memiliki kesempatan yang sama dan merata untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Jika dalam penyelenggaraan pendidikan mengalami suatu hambatan, maka akan menciptakan permasalahan di bidang pendidikan, misalnya pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama di Indonesia.

UNIMAL sudah mulai melakukan pemerataan pendidikan buat seluruh anak bangsa yang ada di pelosok negeri, dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi mereka. UNIMAL membuka jalur penerimaan mahasiswa secara nasional, sehingga seluruh anak bangsa mendapat akses untuk menuntut ilmu di UNIMAL. Bagi anak-anak bangsa yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang) mendapat porsi tersendiri dan UNIMAL bersedia menerima anak-anak bangsa dari daerah 3T lewat jalur afirmasi tanpa batasan kuota. Ini adalah wujud nyata UNIMAL memberikan bakti bagi negeri, untuk pemerataan pendidikan.

Meskipun UNIMAL sangat membuka diri, tetapi persentase mahasiswa dari luar Aceh belum mencapai 50% masih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari total mahasiswa UNIMAL. Tetapi untuk jumlah mahasiswa luar Aceh sebanyak 5.377 orang adalah angka yang besar untuk ukuran kota Lhokseumawe. Jumlah ini lebih banyak dari mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. Namun angka tersebut belum mencapai 50% mahasiswa dari luar Aceh ini dapat disebabkan kampus UNIMAL berada di kabupaten yang infrastrukturnya masih terbatas, bukan di ibukota provinsi dan UNIMAL belum menjadi PTN-BH yang sudah mumpuni. Selain itu UNIMAL baru menjadi PTN tahun 2001, sehingga belum begitu dikenal oleh calon mahasiswa yang berada jauh dari Aceh.

Program studi di UNIMAL yang berjumlah 46 (empat puluh enam) dengan 7 (tujuh) fakultas masih belum mampu melayani semua bidang ilmu. Sehingga perlu terus dilakukan penambahan program studi baru, khususnya yang mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat di Aceh. Seiring semakin bertambahnya program studi baru berdampak semakin banyaknya program studi yang terakreditasi minimal C.

Peningkatan profesional dosen melalui program pendidikan doctoral belum mencapai 50%, begitu juga dengan jabatan fungsional dosen Lektor Kepala masih belum mencapai 30% dan jumlah profesor hanya 3 (tiga) orang. Dosen-dosen yang mendapat sertifikat profesional sudah >50%.

Dokumen Akademik dan dokumen mutu masih perlu perbaikan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diprakarsai oleh Kemendikbud saat ini. Hal ini memerlukan waktu untuk melengkapinya. Proses Pendidikan daring dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui e-learning UNIMAL sudah dapat digunakan, tetapi belum dapat menampung untuk semua kegiatan secara daring. Oleh karena itu masih menggunakan fasilitas lainnya, seperti : *zoom, google classroom, Google Meet* dan lain-lain.

Indeks kelulusan mahasiswa sudah mencapai 84,21% untuk tahun 2019 dengan indeks prestasi kumulatif rata-rata >3,0. UNIMAL juga terus mengembangkan *tracer study* untuk dapat melakukan survei terhadap para alumni yang mencari/mendapatkan kerja dalam durasi waktu tunggu 1-6 bulan setelah menyelesaikan kuliah.

Mahasiswa UNIMAL giat melakukan dan mengikuti kompetisi, baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Mahasiswa UNIMAL mampu meraih prestasi di tingkat internasional, nasional maupun regional, tetapi jumlahnya masih belum begitu banyak.

Ketimpangan hasil pendidikan masih terjadi di antara mahasiswa dengan mahasiswa, fakultas dengan fakultas dan antar program studi. Hal ini terlihat dari jumlah peminat yang sangat banyak pada program studi favorit dan kekurangan mahasiswa pada program studi nonfavorit. Kualitas lulusan yang masih timpang, terlihat dari serapan pada dunia kerja. Selain itu akreditasi antarprogram studi juga masih timpang. Sarana dan prasarana juga masih berbeda antar fakultas, ada fakultas yang sudah terpenuhi kebutuhan minimal dan ada yang masih kurang kebutuhan minimal sarana dan prasarananya. Jumlah dosen juga belum terdistribusi secara merata di setiap program studi, sesuai jenjang pendidikannya dan jabatan fungsionalnya.

Masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari belum memuaskannya angka lulusan bekerja dari UNIMAL. Masih rendahnya mutu dan daya saing UNIMAL antara lain terlihat dari rendahnya peringkat UNIMAL dalam *QS World University Ranking*. Menurut rating yang diliris oleh Kemenristekdikti tahun 2019 rating UNIMAL diurutan 102 nasional. Menurut Scimago Institutions Rankings tahun 2019 UNIMAL diperingkat 2 nasional dan di peringkat 650 dunia. Menurut Webometric Rankings tahun 2019 UNIMAL berada di peringkat 94 nasional dan 5.767 dunia. Menurut UniRank tahun 2019 UNIMAL berada di peringkat 79.

## *B. Penelitian*

Penelitian menjadi urat nadi dari UNIMAL untuk terus berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara. Penelitian terus dikembangkan dengan mengambil beberapa tema penting, diantaranya pertanian, energi, kesehatan, sosiologi, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Penelitian sangat menentukan arah kemajuan bangsa, terlebih lagi untuk kemandirian negara.

Tumbuhnya suatu kesadaran bahwa penelitian memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa semakin dapat dirasakan. Setiap kampus terus berlomba-lomba menjadi pusat riset dan bekerja sama dengan

semua *stakeholder* untuk meningkatkan hasil risetnya. Tanpa keunggulan riset, mustahil Indonesia bisa menjadi negara maju, maka seyogyanya UNIMAL juga harus ikut serta meningkatkan penelitiannya.

Penelitian dosen dan mahasiswa di UNIMAL berfluktuatif sepanjang tahun, ada kala naik tajam, ada kala turun kembali. Belum ada kenaikan penelitian secara linier setiap tahunnya, yang menggunakan sumber dana hibah (simlitabmas-DIKTI). Penelitian menggunakan dana PNBPN UNIMAL, trendnya sangat baik. Hal ini dilihat dari bertambahnya penelitian setiap tahunnya. Data lengkap dari sumber daya penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1** Sumber Daya Penelitian

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SDM Dosen	510	525	536	580
2	Peneliti Asing	3	3	4	5
3	SDM Staf Pendukung	20	20	20	54
4	Peneliti Dana Ditlitabmas	57	77	83	46
5	Peneliti Dana Non Ditlitabmas	32	59	70	94
6	Unit Fasilitas Pendukung/Laboratorium	67	67	67	68

Hasil-hasil publikasi dosen dan mahasiswa UNIMAL dipublikasikan lewat seminar, prosiding, jurnal buku dan media lainnya. Walaupun seminar yang diprakarsai oleh fakultas dan LPPM UNIMAL terasa masih sedikit, tapi cukup efektif dan efisien untuk meningkatkan publikasi dosen dan mahasiswa.

Selain melakukan publikasi hasil-hasil penelitian dalam seminar yang dilakukan oleh UNIMAL, para dosen juga aktif ikut serta sebagai pemateri pada seminar internasional dan seminar nasional yang dilaksanakan oleh kampus lainnya. UNIMAL juga membantu pembiayaan dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut.

UNIMAL Mendorong dosen dan mahasiswa untuk mendaftarkan setiap hasil karyanya kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ataupun hak paten. Ini penting agar setiap karya sivitas akademika mendapat perlindungan hukum dan tidak diklaim oleh pihak lain. Seiring dengan semakin banyaknya penelitian dosen dan mahasiswa, maka semakin bertambah dosen yang mengajukan HKI dan Paten. Walaupun dari data yang ada yang mengajukan HKI dan Paten relatif masih sangat sedikit.

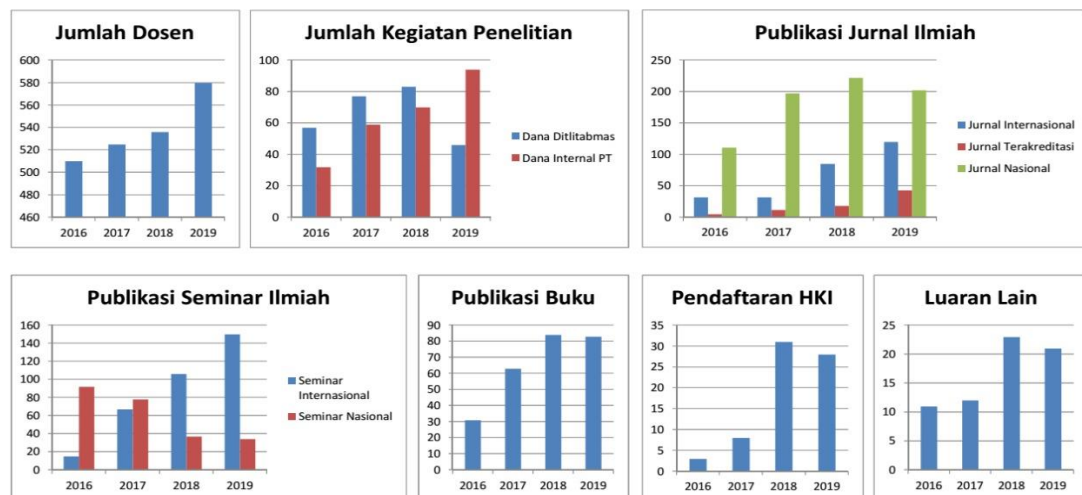
Penelitian yang menggunakan laboratorium sebagai pusat riset, dapat menggunakan laboratorium milik UNIMAL maupun laboratorium dari lembaga lainnya yang bekerja sama dengan UNIMAL. Penggunaan laboratorium, rumah kaca, kebun dan bengkel untuk penelitian terus ditingkatkan Hasil-hasil resume dari manajemen penelitian UNIMAL ditabulasikan dalam tabel 1.2 dan grafik 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2** Manajemen Penelitian



No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan Forum/Seminar Ilmiah	6	13	16	29
2	Manajemen Penelitian (SOP)	12	12	12	12
3	Jurnal International	32	32	85	120
4	Jurnal Nasional Terakreditasi	5	12	18	43
5	Jurnal Nasional (ISSN)	111	197	222	202
6	Buku Ajar	31	63	84	83
7	Seminar International	15	67	106	150
8	Seminar Nasional	92	78	37	34
9	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3	8	31	28
10	Luaran Lainnya	11	12	23	21
11	Kontrak Kerja	4	11	5	4
12	Unit Bisnis	1	1	1	2

KINERJA PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2016 – 2019



**Gambar 1.2** Kinerja Penelitian

### C. Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus diharapkan tidak menjadi menara gading, tinggi menjulang sendiri. Tetapi diharapkan menjadi penerang bagi sekitarnya, oleh karena itu UNIMAL bertanggungjawab untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui para dosen dan mahasiswa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh UNIMAL dalam bidang pertanian, energi, kesehatan, sosiologi, ekonomi, hukum dan pendidikan. Dimana lingkungan kampus UNIMAL masih sangat perlu pemberdayaan masyarakatnya.

Harus terus ditumbuhkembangkan rasa empati dan bertanggungjawab kepada masyarakat sekitar kampus, agar tumbuh sinergi antara kampus dan lingkungan. Kampus harus menjadi tulang punggung pengabdian kepada masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kemajuan masyarakat, mustahil Indonesia bisa menjadi

negara maju, maka seyogyanya UNIMAL juga harus ikut serta memberdayakan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UNIMAL dari anggaran Ditlitabmas setiap tahunnya mengalami penurunan, ini terlihat dari data tahun 2016 sampai tahun 2019. Pengabdian kepada masyarakat tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) judul dengan nilai kontrak Rp.525.500.000,- (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) judul dengan nilai kontrak Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Tahun 2018 sebanyak 2 (dua) judul dengan nilai kontrak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) judul dengan nilai kontrak Rp. 275.300.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pengabdian kepada masyarakat dari sumber PNBPN terus bertambah jumlah dan nilainya. Tahun 2019 pengabdian kepada masyarakat sumber dana PNBPN sebanyak 31 (tiga puluh satu) judul dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### D. *Administrasi Umum, Keuangan, Tata Kelola, Birokrasi dan Aset*

Dalam mewujudkan pelayanan prima di UNIMAL perlu optimalisasi pelayanan di semua sektor yang ada. Tata kelola kampus UNIMAL sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif saat ini. Setiap kampus memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, begitu juga UNIMAL. Agar UNIMAL menjadi berkualitas, maka diperlukan tata kelola yang baik untuk mewujudkan *good governance*.

Semua unsur untuk mewujudkan *good governance*, berupa transparansi, pengorganisasian, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan kepemimpinan harus mampu diwujudkan di UNIMAL. Transparansi merupakan kebijakan regulasi, program, kegiatan dan anggaran UNIMAL diketahui serta dipahami oleh sivitas akademika sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif. Organisasi UNIMAL harus mampu menerapkan berbagai prinsip pengorganisasian, seperti menetapkan tata hubungan kerja, rincian tugas pokok, fungsi/wewenang serta melakukan pengarahan. Pengambilan keputusan strategis harus melibatkan secara partisipatif *stakeholders* eksternal dan internal, sehingga *stakeholders* dapat mendukungnya secara aktif. Kebijakan, regulasi, dan pengalokasian anggaran harus mendapatkan dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika. Efisiensi dan efektivitas adalah upaya untuk membuat sivitas akademika faham dan dapat memberi komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, regulasi dan program yang ditetapkan. Akuntabilitas diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pertanggungjawaban unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan diperlukan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mampu memotivasi sivitas akademika untuk bekerja secara produktif dalam mencapai visi dan misi dan tujuan UNIMAL. Semua unsur-unsur utama tersebut tidak dipenuhi secara terpisah, melainkan harus dipenuhi secara integratif.

Di era modern seperti saat ini, banyak cara untuk melengkapi 6 (enam) unsur utama tata kelola UNIMAL yang baik seperti yang dijelaskan di atas,

salah satunya dengan penggunaan teknologi, seperti penggunaan sistem informasi manajemen akademik yang dapat merealisasikan transparansi, pengorganisasian, responsivitas, dan unsur-unsur lainnya.

Penyiapan sarana dan prasarana untuk pelayanan prima bagi seluruh sivitas akademika UNIMAL masih sangat terbatas. Bantuan pemerintah lewat dana “loan” dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menyiapkan 15 (lima belas) bangunan fisik masih berproses. Status UNIMAL sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengurangi kecepatan akselerasi UNIMAL. Penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri UNIMAL masih terhambat, mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan klinik UNIMAL. Dalam era sekarang ini, kebutuhan akan akses internet menjadi kebutuhan utama. Akses internet harus dapat diakses dari setiap tempat dalam kampus UNIMAL. Akses internet ini diperlukan untuk mendukung kuliah online serta memanfaatkan area diskusi.

Integrasi pengelola keuangan diperlukan untuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Perlu dibuatkan standar operasional prosedur untuk melakukan pelayanan prima. Peningkatan dana untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, insentif penulisan buku, insentif mengikuti seminar serta insentif HKI dan paten sudah sangat mendesak.

Penempatan jabatan dilakukan secara transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, dan adil mulai pada jajaran rektorat, fakultas dan jurusan/prodi. Peningkatan kinerja birokrasi melalui karier, disiplin, etos kerja perlu terus dikampanyekan.

Peningkatan *revenue generating* belum tercapai akibat masih belum adanya unit usaha yang mumpuni. Diperlukan peningkatan anggaran perawatan kampus untuk peningkatan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kampus.

#### E. *Sistem Informasi, Perencanaan dan Kerja Sama*

Sistem informasi integrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh sivitas akademika UNIMAL, sehingga ini menjadi hal yang utama harus dilakukan. UNIMAL yang memiliki 4 (empat) lokasi kampus, membutuhkan *master plan* yang baik untuk optimalisasi pengelolaannya. Kebutuhan *bandwidth* yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa dan peningkatan kebutuhan di era revolusi industri 4.0.

UNIMAL memiliki tanggung jawab untuk membangun kerja sama secara komprehensif dengan dunia industri dan kampus yang lebih maju dalam skala nasional maupun internasional. Kemampuan laboratorium UNIMAL juga dapat dipakai untuk pelatihan tenaga kerja, khususnya dalam bidang industri dan pertanian. Pelaksanaan CSR industri yang ada di sekitar UNIMAL bersinergi melakukan pemetaan potensi masyarakat dan terlibat dalam implementasinya.

### 1.5 Tantangan Mensukseskan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024

Berkaca dari permasalahan yang ada, UNIMAL mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam memajukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi umum, keuangan, tata kelola, birokrasi dan aset serta sistem informasi, perencanaan dan kerja sama. Tabel 1.3 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut.

**Tabel 1.3** Tantangan Pemajuan Pendidikan

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan tertutup, yaitu (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3.	Memerdekakan pembelajaran, yaitu pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
.	Memerdekakan dosen sebagai penerus pengetahuan, yaitu menjadikan dosen sebagai fasilitator pembelajaran
5.	Memerdekakan hasil inovasi, yaitu menciptakan gagasan baru secara mandiri, berkelompok dan kolaborasi dengan institusi lain, untuk melayani kebutuhan umat & memperkaya nilai ilmu pengetahuan
6.	Memerdekakan etika ilmu, yaitu mentaati kumpulan nilai akhlak yang terkandung dalam kode etik akademik dan peraturan lainnya, untuk membentuk akademisi yang beretika, menghormati nilai kehidupan, nilai kemanusiaan, dan nilai kebenaran.
7.	Memerdekakan untuk bangun reputasi akademisi, yaitu tangguh mengembangkan akademisi dalam berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional untuk memperkuat daya saing dan kompetensi di berbagai bidang ilmu untuk menguasai perubahan yang bermanfaat bagi umat.
8.	Memerdekakan akademik atmosfer, yaitu menata iklim kampus yang harmonis, meningkatkan kesehatan organisasi dan manajemen yang dinamis dan mereformasi capaian visi dan misi, untuk melahirkan nuansa lingkungan kampus berjiwa akademik ilmiah, cerdas, dan kreatif menciptakan cara baru/kerja baru/produk baru.
9.	Memerdekakan teknologi informasi, yaitu menguasai jaringan teknologi informasi berbasis kinerja dan jaringan teknologi informasi dunia untuk memperoleh berbagai inovasi ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan inovasi seni budaya.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### 2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila



Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

(3) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan

mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

#### (6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya.

## 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

## 2.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

### 1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

## 2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton;

## 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.



#### 4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

#### 5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

#### 6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

#### 7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud

memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima.

## 2.4 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

## 2.5 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Tujuan terkait
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3.	Menguatnya karakter peserta didik	3
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5

## 2.6 Visi Universitas Malikussaleh

UNIMAL sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memajukan pembangunan SDM, agar tercapai SDM Unggul Indonesia Maju. UNIMAL yang berada di Aceh, salah satu daerah yang pernah berkonflik dengan pemerintah pusat perlu kiranya untuk membangun SDM agar terhindar dari perpecahan bangsa.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 di mana kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat cepat perlu kiranya UNIMAL menyikapi dengan sangat serius agar tidak tertinggal dalam dunia pendidikan. UNIMAL mempunyai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dengan melakukan inovasi-inovasi menyikapi kemajuan zaman.

Visi yang disusun oleh UNIMAL Tahun 2020-2024 adalah mengikuti Visi dari kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Adapun Visi UNIMAL 2020-2024 adalah:

**Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal**

Makna visi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menjadi Universitas Unggul

Kemampuan melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan internasional serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS). SDM memiliki keahlian untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ipteks. SDM memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan memiliki *sense of art* yang mampu bersaing untuk menjamin kelangsungan hidup. Transformasi ipteks merupakan jawaban dari adanya tuntutan dalam era reformasi, modernisasi dan globalisasi. UNIMAL dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat memanfaatkan potensi lokal dalam mengembangkan produk inovatif yang kompetitif. Program/kegiatan dirancang untuk mencetak SDM unggul, mulai dari beasiswa mahasiswa, dosen, peneliti dan perekayasa hingga pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi lokal. Mereka merupakan tulang punggung dalam menjadikan SDM Inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi. Mempunyai reputasi tinggi sehingga mampu berkontribusi pada masyarakat melalui proses pendiseminasian ilmu pengetahuan (pendidikan), penemuan pengetahuan baru (penelitian) dan pengaplikasian ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia yang unggul (pengabdian pada masyarakat).

Keunggulan di bidang rekayasa ditentukan oleh besarnya kontribusi produk UNIMAL yang berkualitas terhadap pengembangan dan penerapan ipteks dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di lingkungan UNIMAL. Produk yang dihasilkan oleh UNIMAL dalam skala laboratorium harus dapat diubah menjadi produk berskala industri pertanian yang memiliki daya saing regional maupun internasional. Dalam proses pengembangan kualitas produk industri pertanian, UNIMAL harus mampu memberi sumbangan terhadap kualitas dan efisiensi proses dan produk yang berbasis pada hasil riset terapan yang akurat dan dilakukan secara berkelanjutan. Kontribusi Unimal juga dapat berupa *technical assistance* untuk ekspansi dan ekstensifikasi dalam bidang *service marketing* berbagai produk industri khususnya produk pertanian. Dalam konteks ini manajemen industri layak menjadi kajian strategis bagi UNIMAL. Sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan menghasilkan jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan, jumlah publikasi nasional dan internasional, jumlah prototipe penelitian dan pengembangan (research and development/R & D), jumlah prototipe industri, jumlah sitasi karya ilmiah dan jumlah penelitian yang

dimanfaatkan masyarakat serta jumlah produk inovasi dengan sasaran menguatnya kapasitas inovasi yang dihasilkan oleh dosen UNIMAL. Peningkatan daya saing atau daya jual produk teknologi dengan sentuhan karya seni juga merupakan kajian yang akan dikembangkan oleh UNIMAL. Kajian yang juga akan dilakukan adalah pengembangan material baru berbasis potensi lokal yang memungkinkan untuk meningkatkan nilai jual bahan alam yang dihasilkan atau meningkatkan kualitas material dasar bagi kebutuhan pengembangan teknologi terpakai di Indonesia. Pengembangan energi terbarukan akan diupayakan melalui kerja sama dengan instansi lain dan pihak yang berminat. Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian atau jasa lainnya diharapkan mampu meningkatkan PNBPN Unimal di luar UKT mahasiswa.

#### b. Di Tingkat Internasional

1. Mengadopsi standar-standar nasional dan internasional pengelolaan perguruan tinggi.
2. Menjadi perguruan tinggi yang menjalankan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi tingkat internasional.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diakui oleh komunitas global.
4. Mempunyai lulusan yang mempunyai kompetensi dan daya saing global.
5. Menjalin kerja sama dan membangun jejaring dengan perguruan tinggi asing.
6. Dikenal di dunia internasional.

#### c. Berbasis Potensi Lokal

Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan SDM pada suatu daerah. Mencapai keunggulan di tingkat internasional berbasis potensi lokal meliputi potensi keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografi, budaya dan historis melalui pendidikan tinggi.

## 2.7 Misi Universitas Malikussaleh

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden dan Kemendikbud, UNIMAL menyusun misi yang mengaju kepada misi Kemendikbud. Misi UNIMAL sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima buat sivitas akademika dan masyarakat secara luas. Misi UNIMAL adalah sebagai berikut:

### **Misi**

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik; dan

4. Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi.

### **Perwujudan Misi**

Misi UNIMAL mengutamakan sinergisme komponen misi menciptakan berbagai peluang yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia untuk memimpin perkembangan dan perubahan masyarakat secara etis melalui kegiatan tridarmna perguruan tinggi yang kreatif dan inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan baik lokal maupun global.
- 2) Berbagi ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia melalui keunggulan program tridarma perguruan tinggi berkualitas dan bersama para pemangku kepentingan memperkaya dan menyebarkannya, untuk menyelesaikan permasalahan serta dapat meningkatkan daya saing bangsa.
- 3) Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat kampus yang sejahtera dengan dukungan sumber daya yang memadai.
- 4) Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia untuk melayani masyarakat, industri dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan dunia secara berkelanjutan.

### **Asas Misi**

Asas dari Misi UNIMAL adalah religi, yuridis, ilmu, kearifan lokal, dan organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Religi adalah didasari atas fatahah, amanah, siddiq dan tabliq.
  - **Fatanah** adalah cerdas seringkali berimprovisasi dan lebih kreatif dalam melakukan sesuatu. Kemampuan berfikir cerdas sangatlah cepat, sehingga ia sangat mudah mengerti, memahami, dan menangkap maksud dari suatu kondisi atau keadaan
  - **Amanah** adalah benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad Saw dijuluki oleh penduduk Mekkah dengan gelar "Al Amin" yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apa pun yang beliau ucapkan, penduduk Mekkah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong.
  - **Siddiq** adalah benar, bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya.
  - **Tabliq** adalah menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi.

## 2) Yuridis

- Adil adalah setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang
- Terbuka adalah perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat/masukan dr oranglain
- Kepastian adalah bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
- Akuntabel adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
- Etika adalah norma yang menjadi asas yang mendasari pengaturan

## 3) Ilmu

- Adil adalah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, tidak kurang tidak lebih
- Terbuka adalah pengetahuan yang transparan, dapat diakses secara bebas, tersebar luas, dan dikembangkan bersama melalui jaringan kolaboratif.
- Akuntabel adalah keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan di Universitas Malikussaleh dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
- Etika adalah bagaimana sivitas akademika menjalankan tugas, fungsi dan peranannya secara beretika dan mencau pada norma

## 4) Kearifan Lokal

- Taat adalah suatu sikap senantiasa tunduk dan patuh kepada Pencipta, hal ini dapat dilihat impementasinya dalam pekerjaan yang dijalankan oleh setiap individu di UNIMAL
- Adil adalah sikap tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, memandang sesutau itu secara sama
- Penakluk adalah sifat yang dimiliki agar bisa menguasai ilmu sesuai dengan kompetensi.
- Visioner adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di UNIMAL terhadap apa yang dilakukan.
- Reputasi adalah kedudukan strategis orang dalam organisasi di mata seseorang. Seseorang yang menikmati reputasi baik pasti lebih disukai dan lebih baik untuk mengambil peran kepemimpinan

## 5) Organisasi

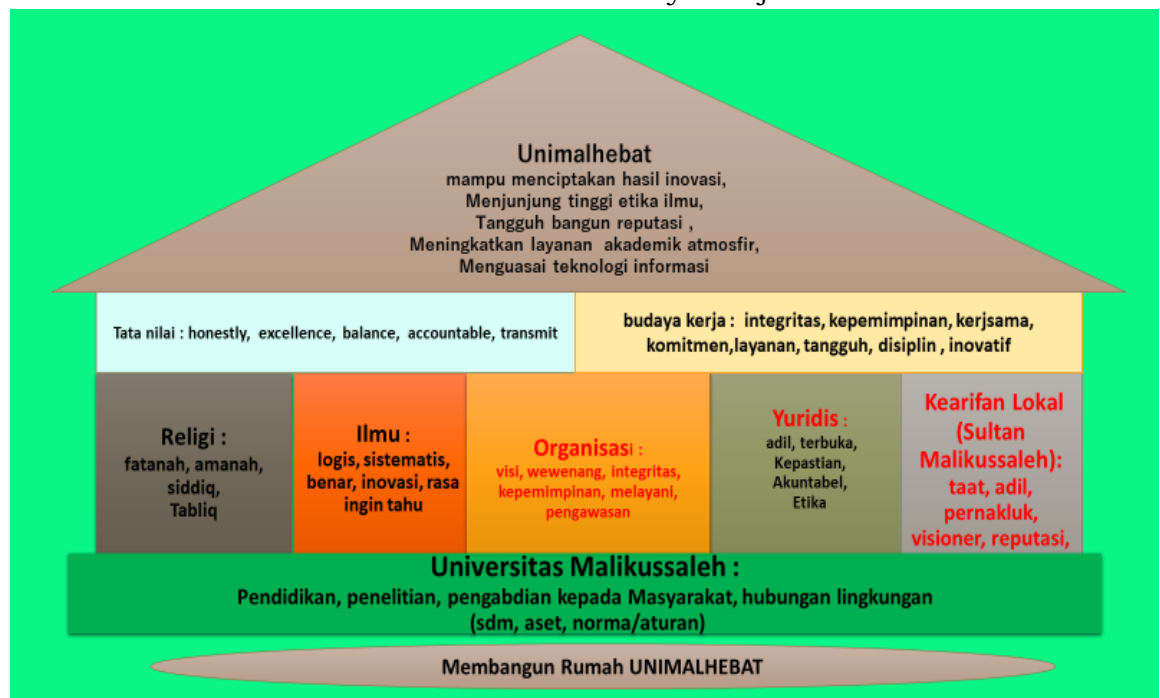
- Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan oleh setiap sivitas akademika yang sesuai dengan visi UNIMAL.

- Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan UNIMAL sebagai lembaga pendidikan.
- Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu
- Melayani adalah sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders
- Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan setiap individu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UNIMAL

## 2.8 Tata Nilai dan Budaya Kerja Universitas Malikussaleh

Pelaksanaan tata nilai dan budaya kerja UNIMAL adalah usaha pencapaian visi dan misi UNIMAL. Oleh karena itu, diperlukan penerapan tata nilai dan budaya yang kuat mendukung visi misi dan mencapai unimalhebat 2024 seperti pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2 Tata Nilai dan Budaya Kerja Unimal



Tata nilai dan budaya kerja merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai sivitas akademika UNIMAL dalam menjalankan fungsi sebagai manusia berbudi luhur dan setia pada



kejujuran berlandaskan Pancasila. Siklus unimalhebat2024 adalah seperti pada gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Siklus Unimalhebat 2024



Tata Nilai dan Budaya Kerja yang diutamakan pada Renstra UNIMAL 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Nilai

Tata Nilai (*value*) mengacu pada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di UNIMAL, di mana seluruh dosen dan tenaga kependidikan bekerja sesuai yang diharapkan. Tata nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh UNIMAL. Tata nilai mendukung dan menuntun pengambilan keputusan setiap tenaga kerja, membantu organisasi dalam melaksanakan misinya, dan mencapai visinya dengan cara yang benar.

Tata nilai adalah kualitas yang disukai, dihargai, diinginkan, berguna dan objek kepentingan. Tata Nilai memberi makna bagi seluruh sivitas akademika yang menyangkut perbuatan maupun tindakan.

Ada 5 (lima) pondasi Tata Nilai UNIMAL yang dikenal dengan kata “HEBAT”, yaitu :

- a) H = *Honest* (Kejujuran)/Siddiq. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap jujur jujur, mandiri, tangguh dan realistis.
- b) E = *Excellence* (Keunggulan)/Fathanah. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap kreatif, inovatif dan rasa ingin tahu yang tinggi.
- c) B = *Balance* (Keseimbangan)/Washitiah. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap adil, setara dan harmonis.

- d) A = *Accountable* (Bertanggung jawab)/Amanah. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap berani, berorientasi hasil, disiplin, komitmen dan kerja keras .
- e) T = *Transmit* (Menyebarkan)/Tabliq. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap seperti seorang pemimpin, berkerja sama dan komunikatif.

Diagram pelaksanaan Tana Nilai UNIMAL yang menjadi cita-cita bersama dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4 Siklus Tata Nilai Hebat



Diagram pelaksanaan Tana Nilai UNIMAL yang menjadi cita-cita bersama dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.5 Prinsip Utama Tata Nilai Hebat



## 2. Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan asumsi, nilai dan norma yang dilakukan berulang-ulang oleh dosen dan tenaga kependidikan yang dikembangkan dalam organisasi UNIMAL tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja sebagai kekuatan untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Budaya kerja merupakan pernyataan filosofis, dapat difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat pada dosen dan tenaga kependidikan karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Budaya kerja, merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam organisasi UNIMAL. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik.

Budaya kerja sudah lama dikenal oleh UNIMAL, namun belum disadari bahwa suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Nilai-nilai tersebut bermula dari adat istiadat, agama, norma dan kaidah yang menjadi keyakinan pada diri pelaku kerja yang berupa integritas, kepemimpinan, kerja sama, komitmen, layanan, tangguh, disiplin, dan inovasi. Nilai-nilai yang menjadi kebiasaan tersebut dinamakan budaya dan mengingat hal ini dikaitkan dengan mutu kerja, sehingga dinamakan budaya kerja.

Gambar 2.6. Prinsip Budaya Kerja



Prinsip budaya kerja operasional seperti pada gambar 2.6 terdiri dari integritas berupa sikap yang konsisten dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keyakinan dan kebijakan serta taat antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang diyakini oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Indikatornya berupa konsisten, jujur, tulus, taat asas, mandiri, dan menepati janji.

Kepemimpinan adalah situasi dan kondisi tertentu seorang dosen dengan tugas tambahan atau pejabat struktur tenaga kependidikan mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengurus dan melayani orang lain, bawahan dan masyarakat agar maju, berkembang, dan sejahtera. Indikatornya meliputi kompetensi, wibawa, berani, peluang, dan jejaring.

Kerja sama suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa dosen dan staf untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Indikatornya saling berkontribusi, berkomunikasi, saling percaya, mengarahkan kemampuan dan bersifat terbuka.

Komitmen adalah menerima nilai-nilai, visi misi UNIMAL dan mempunyai keyakinan yang kuat untuk bertugas, berkewajiban serta tetap bertahan dalam segala kebajikan. Indikatornya terlibat, terikat, karir, setia, bangga, dan loyalitas.

Layanan berupa usaha memenuhi kepentingan sivitas akademika UNIMAL sesuai dengan haknya, yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Indikatornya keramahan, tepat waktu, akurasi, cekatan, atribut, dan kenyamanan.

Tangguh adalah pribadi yang pantang menyerah dan tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi menimpanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Indikatornya penakluk, handal, ulet dan kokoh.

Disiplin merupakan perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan, tata tertib dan norma atas dasar kerelaan diri maupun atas suatu perintah ataupun atas tuntutan baik tertulis atau tidak tertulis. Indikatornya taat, teladan, penghargaan, kehadiran, dan kompensasi.

Inovatif adalah transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta keterampilan untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru serta tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Indikatornya inovasi proses, inovasi produk, inovasi jasa, inovasi organisasi, dan inovasi pasar.

### 3. Kinerja

Kinerja berupa prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang, baik dosen maupun tenaga kependidikan di UNIMAL. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dosen maupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses dijalani. Kinerja merupakan prestasi kerja yang berupa perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan.

Kinerja berupa hasil atau tingkat keberhasilan seorang dosen maupun tenaga kependidikan secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama dalam lingkungan UNIMAL.

Dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan di lingkungan UNIMAL seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memahami pilar perubahan yang telah ditetapkan melalui rapat senat UNIMAL. Pada gambar 2.7 berikut ini diperlihatkan paradigma perubahan tersebut untuk menuju Unimahebat2024.

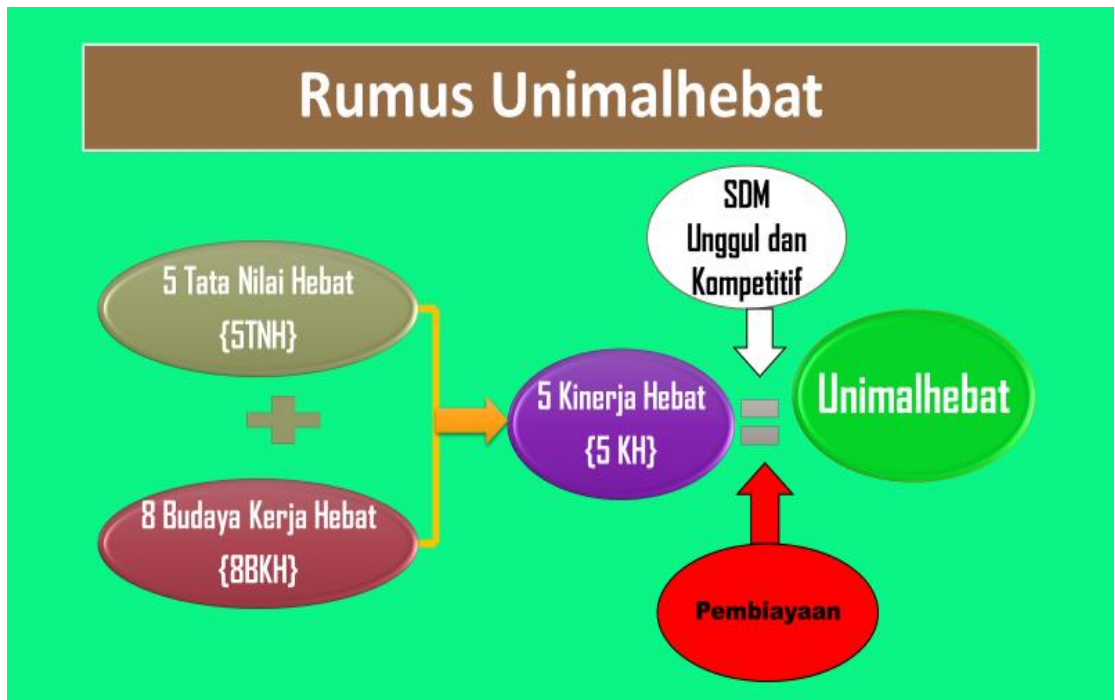
Gambar 2.7. Pilar Perubahan



Pilar Unimalhebat2024 seperti gambar di atas menjelaskan tata nilai hebat dan budaya kerja hebat menghasilkan kinerja hebat. Tata nilai hebat dengan parameter *Honesty*, *Excellent*, *balance*, *Accountable* dan *Transmit*. Ditambah budaya kerja hebat yang terdiri dari Integritas, Kepemimpinan, Kerja Sama, Komitmen, Layanan, Tangguh, Disiplin, dan Inovatif menghasilkan kinerja hebat berupa Hasil Inovasi, Etika Ilmu, Bangun Reputasi, Akademik Atmosfir, dan Teknologi Informasi.

Rumusan Unimalhebat2024 diperoleh dari 5 (lima) Tata nilai HEBAT digabungkan dengan 8 (delapan) budaya kerja hebat menghasilkan 5 (lima) kinerja hebat. Dukungan pembiayaan yang optimal dan SDM unggul serta kompetitis menghasilkan Unimalhebat2024, seperti pada gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 2.8. Rumusan Unimalhebat



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Hebat UNIMAL

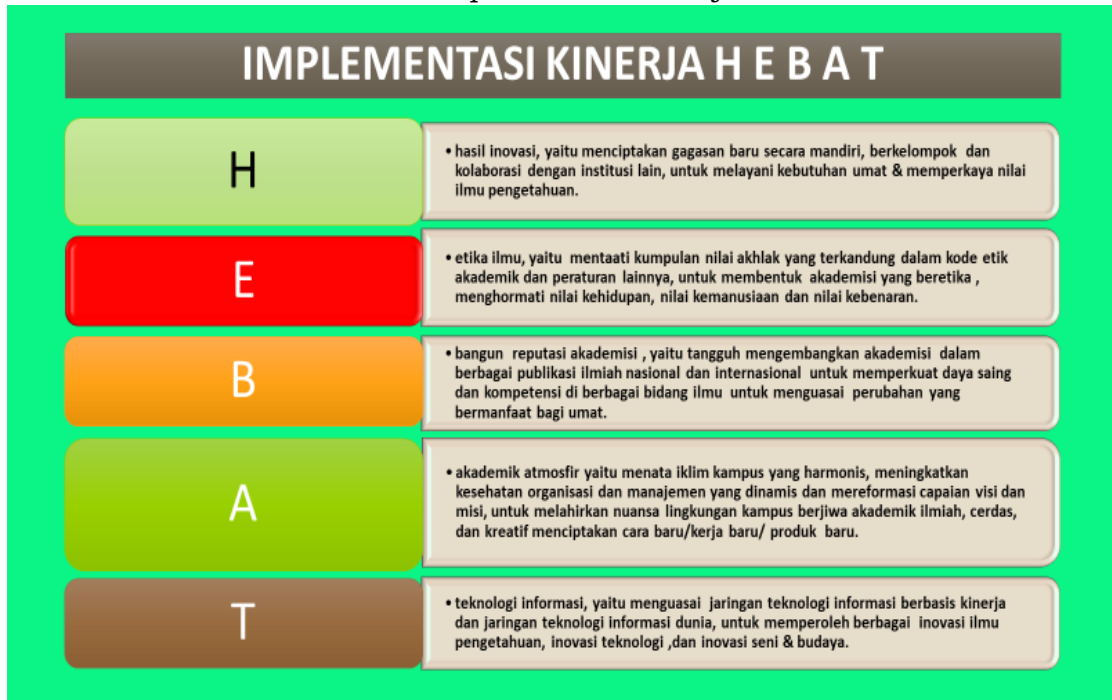
- Efektivitas dan Efisiensi suatu tujuan tertentu yang dapat dicapai oleh UNIMA: itu adalah efektif. Efisien adalah terjadinya penghematan dalam mencapai tujuan dengan anggaran yang minimal.
- Otoritas merupakan sifat komunikasi di UNIMAL yang dimiliki pimpinan kepada stafnya untuk melakukan kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.
- Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang ada di UNIMAL.
- Inisiatif merupakan daya pikir dan kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaotang dengan tujuan UNIMAL.

Karakteristik Kinerja Hebat UNIMAL adalah:

- Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi;
- Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi;
- Memiliki tujuan yang realistis;
- Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan;
- Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya;
- Merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Unimalhebat dan karakteristik Unimalhebat diharapkan mampu menghasilkan implementasi Unimalhebat yang terdiri dari parameter seperti pada gambar 2.9.

Gambar 2.9. Implementasi Kinerja Hebat



- hasil inovasi, yaitu menciptakan gagasan baru secara mandiri, berkelompok dan kolaborasi dengan institusi lain, untuk melayani kebutuhan umat & memperkaya nilai ilmu pengetahuan.
- etika ilmu, yaitu mentaati kumpulan nilai akhlak yang terkandung dalam kode etik akademik dan peraturan lainnya, untuk membentuk akademisi yang beretika, menghormati nilai kehidupan, nilai kemanusiaan, dan nilai kebenaran
- bangun reputasi akademisi, yaitu tangguh mengembangkan akademisi dalam berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional untuk memperkuat daya saing dan kompetensi di berbagai bidang ilmu untuk menguasai perubahan yang bermanfaat bagi umat.
- akademik atmosfir yaitu menata iklim kampus yang harmonis, meningkatkan kesehatan organisasi dan manajemen yang dinamis dan mereformasi capaian visi dan misi, untuk melahirkan nuansa lingkungan kampus berjiwa akademik ilmiah, cerdas, dan kreatif menciptakan cara baru/kerja baru/produk baru.
- teknologi informasi, yaitu menguasai jaringan teknologi informasi berbasis kinerja dan jaringan teknologi informasi dunia, untuk memperoleh berbagai inovasi ilmu pengetahuan, inovasi teknologi serta inovasi seni dan budaya.

#### Indikator Kinerja Hebat UNIMAL

- a. Kualitas, merupakan kualitas kerja yang diukur dari persepsi dosen dan tenaga kependidikan terhadap kualitas pekerjaan yang

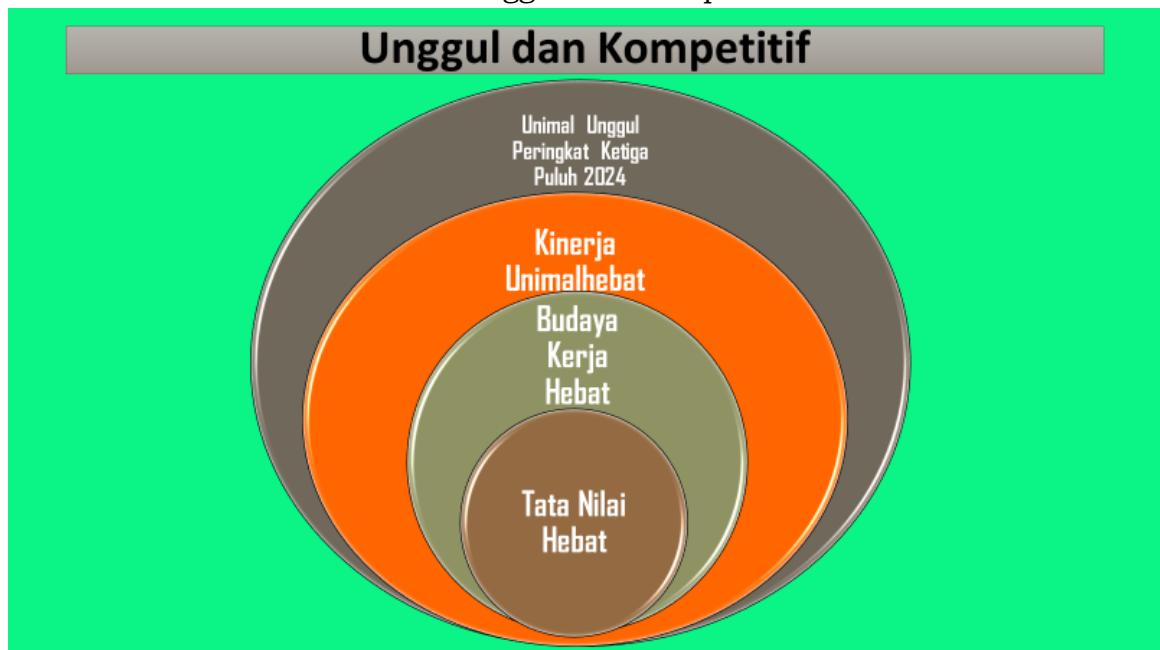


dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan.

- b. Kuantitas, merupakan jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas yang dapat diselesaikan tepat waktu dan memaksimalkan waktu yang ada untuk aktivitas lainnya.
- d. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya manusia secara maksimal dari setiap uni kerja.
- e. Kemandirian, merupakan tingkat seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dapat menjalankan fungsi kerjanya sesuai perjanjian kerja sebelumnya.

Dari indikator kinerja Unimalhebat akan menghasilkan keunggulan dan kompetitif di UNIMAL. Tata nilai hebat, budaya kerja hebat dan kinerja Unimalhebat akan menghasilkan keunggulan UNIMAL diperingkat 39 secara nasional (versi Kemendikbud RI) seperti pada gambar 2.10 berikut ini.

Gambar 2.10. Unggul dan Kompetitif



#### a. Tujuan

- Menghasilkan lulusan bermutu tinggi, berakhlak mulia, mandiri, cerdas dan religius serta mampu bersaing dan berkembang secara profesional.
- Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.



- Menghasilkan kinerja perguruan tinggi yang efektif, efisien dan berintegritas untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

**b. Sasaran**

- Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan.
- Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya.
- Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.
- Menguatnya kapasitas inovasi.

**2.9 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat Tabel 2.3

Tabel 2.3. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal	Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat	Menghasilkan lulusan bermutu tinggi, berakhlak mulia, mandiri, cerdas dan religius serta mampu bersaing dan berkembang secara profesional	1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan; 2. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya.
	Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional.	Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum, Kesehatan, dan lingkungan hidup.	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat	Menguatnya kapasitas inovasi.

	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;	melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum. kesehatan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.	
	Meningkatkan kapabilitas, otonomi, akuntabilitas dan transparan perguruan tinggi dalam meningkatkan pencapaian layanan pendidikan secara berkelanjutan.	Menghasilkan kinerja perguruan tinggi yang efektif, efisien dan berintegritas untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas kelembagaan

## 2.10. Sasaran dan Strategi Pencapaian

### 2.10.1 Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Universitas Malikussaleh 2020-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Universitas Malikussaleh 2020-2029

No.	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan</b>					
	a. Jumlah mahasiswa berwirausaha	10	15	20	25	30

	b. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	5%	10%	15%	20%	25%
	c. Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja	5%	7%	10%	13%	15%
	d. Persentase Program Studi terakreditasi A	5%	10%	15%	20%	30%
	e. Persentase Program Studi terakreditasi B	82%	80%	78%	75%	70%
	f. Jumlah program studi berakreditasi internasional	-	2	4	6	10
	g. Jumlah mahasiswa berprestasi	94	105	120	130	150
	h. Persentase lulusan tepat waktu	35%	45%	60%	70%	80%
	i. Rata-rata lama studi lulusan	5,0	4,9	4,7	4,5	4,3
	j. Rata-rata IPK lulusan	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3
	k. Persentase mahasiswa penerima beasiswa	44%	46%	48%	50%	52%
	l. Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa	38%	34%	30%	27%	25%
	m. Rasio Dosen S3 tetap terhadap jumlah dosen	18%	20%	23%	27%	30%
	n. Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi	5%	7%	10%	15%	20%

	o. Program Studi Baru	1	4	17	4	4
	p. E-learning	75%	35%	40%	45%	50%
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan</b>					
	a. Ranking PT Nasional	90	80	70	50	39
	b. Akreditasi institusi	B	B	B	B	A
	c. Persentase lulusan Perguruan Tinggi yang langsung bekerja	48%	50%	52%	54%	56%
	d. Kerja sama Perguruan Tinggi Luar Negeri	3	5	10	15	20
	e. Kerja sama Perguruan Tinggi dalam Negeri	5	10	15	20	25
	f. Kerja sama Dunia Industri	10	20	40	60	80
	g. Kerja sama Lainnya	10	10	10	10	10
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya</b>					
	a. Persentase dosen berkualifikasi S3	19%	21%	23%	25%	28%
	b. Jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala	113	120	140	165	200
	c. Jumlah dosen dengan jabatan guru besar	4	6	8	10	12
<b>4</b>	<b>Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan</b>					
	a. Jumlah kekayaan	55	100	150	200	250

	intelektual yang didaftarkan					
	b. Jumlah publikasi nasional	131	150	200	300	400
	c. Jumlah publikasi internasional	84	100	120	150	200
	d. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R & D)	2	2	3	3	6
	e. Jumlah Prototipe Industri	2	2	3	34	
	f. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	945	1000	1100	1300	1500
	g. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	2	5	7	15	25
	h. Jurnal Terakreditasi	1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>Menguatnya kapasitas inovasi</b>					
	a. Jumlah produk inovasi	6	8	8	10	12

### 2.10.2 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan keunggulan universitas pada taraf internasional.
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia serta daya dukung sarana dan prasarana secara berkelanjutan dalam menunjang aktifitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. Peningkatan standar kualitas dosen dan staf administrasi yang memiliki komitmen, etika, integritas, dan akuntabilitas.
- d. Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, moral dan keterampilan yang dapat ditunjukkan dan ditampilkan di depan pengguna (user).
- e. Peningkatan kuantitas dosen melalui rekrutmen dosen tetap PNS atau nonPNS yang kompetitif.

- f. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan yang sinergis dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- g. Peningkatan kepercayaan (*social reliability*) dan jaringan kerja untuk mendukung pengembangan universitas secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”**

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima (5) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

**“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”**

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

##### 3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud

Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;</li> <li>2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;</li> <li>3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;</li> <li>4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;</li> <li>5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;</li> </ol>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produktivitas dan daya saing</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan</li> <li>2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.</li> </ol>
2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</li> <li>2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;</li> </ol>

- Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk



No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
			3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4. pengembangan diplomasi budaya 5. untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	1. Peningkatan budaya literasi; 2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pematapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar



Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antarelelemen masyarakat, dan budaya;
2. Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

1. ekosistem pendidikan;
2. guru;
3. pedagogi;
4. kurikulum; dan
5. sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan

Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna menjadikan guru dan murid mampu menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- a. pembukaan program studi baru;
- b. sistem akreditasi perguruan tinggi;
- c. perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- d. hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

### 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi UNIMAL

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak di UNIMAL. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula

merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Strategi adalah upaya yang sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis. Setiap strategi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan komponen sistem pendidikan tinggi di UNIMAL yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sarana-prasarana, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Strategi dan arah kebijakan UNIMAL ke depan harus sejalan dengan upaya peningkatan mutu dan penguatan daya saing institusi. Pengembangan pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia yang mempunyai daya saing tinggi dalam dunia kerja di tingkat internasional dan nasional dan unggul di Sumatera dengan potensi lokal.

Demi tercapainya hal yang telah dijelaskan sebelumnya, UNIMAL harus melakukan perubahan-perubahan terhadap strategi pencapaian kompetensi lulusannya, kurikulumnya, proses belajar mengajarnya, penilaian prestasi belajarnya, pendidik dan tenaga kependidikannya, sarana dan prasarananya, pendanaannya, dan pengelolaannya. Memperkuat struktur penelitian dan pengabdian, publikasi ilmiah, inovasi dan inkubator bisnis serta peningkatan keilmuan.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi UNIMAL secara umum. Di samping itu, arah kebijakan dan strategi pengembangannya mempertimbangkan isu-isu strategis dan kebijakan strategis. Agar arah pembangunan secara konsisten mengarah pada visi yang telah disepakati bersama, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan UNIMAL harus selaras dengan Visi dan Misi yang telah disepakati seperti telah diulas pada BAB sebelumnya.

Arah kebijakan dan strategi UNIMAL pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024. Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi UNIMAL untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan

Strategi yang dilakukan UNIMAL dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

- a. meningkatkan daya tampung, membuka program studi baru, dan pembukaan akses seluas-luasnya bagi masyarakat;
- b. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat e-learning UNIMAL sebagai *platform* pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
- c. membantu menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui kerja sama dengan pihak ketiga

- d. mendorong kemitraan dengan dunia industri.

Strategi yang dilakukan UNIMAL dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- a. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
- b. memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama;
- c. memadukan seluruh sumber daya yang ada.

Strategi yang dilakukan UNIMAL dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

- a. menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja;
- b. mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
- c. (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (*school excellence*) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (*formative assessment*), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;
- d. memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
- e. mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
- f. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
- g. mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
- h. menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
- i. mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:

1. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridarma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
2. merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
3. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
4. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *Centers of Excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
5. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
6. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
7. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (*Top 100 QS/THES*) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
8. meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek;
9. membangun *Science Techno Park* di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;
10. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam '*pentahelix*' untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
11. mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
12. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
13. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;

14. mengembangkan *future skills platform* bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
15. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
16. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

## 2. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- a. kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
- b. perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
- c. kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1. melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
2. mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
3. mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
4. menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
5. memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
2. memfasilitasi *exchange of information* dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
3. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui *tracer study*;
4. mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar

- dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
5. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
  6. menjalankan program penempatan kerja dan praktik kerja industri langsung dengan DU/DI;
  7. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
  8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
  9. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
  10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema *Multi Exit, Multi Entry System*, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
  11. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
  12. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
  13. mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
  14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
3. mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
4. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;



5. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
6. memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
7. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
8. menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
9. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui *platform* teknologi; dan
10. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

### 3. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

- a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

1. membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
  - a. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
  - b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
  - c. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
  - d. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
  - e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan

- f. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
2. memperkenalkan survei keadaan sekolah (*school climate survey*) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
3. mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (*children wellbeing*).

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:

1. melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni
  2. Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
  3. melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama); melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
  4. mendorong kegiatan pertukaran antarpelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
  5. memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
  6. melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-
  7. nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan
  8. membantu pengembangan muatan lokal terutama bahasa daerah dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal.
4. Penguatan Tata Kelola Pendidikan
- Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:
- a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
  - b. efisiensi satuan pendidikan meningkat;
  - c. akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan
  - d. perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

1. melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
2. mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain:
  - a. formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru; dan
  - b. pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik dan DAK nonfisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran nontunai (*cashless*).
3. mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi.

1. memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan; dan
2. membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota.

#### 3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.</li> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);</li> <li>4. Standar pendidikan.</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/<i>online</i>).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.</li> </ol> <p>Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ul>	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	Tahun 2021

2	Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Diektorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	Tahun 2021
3	Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.</li> <li>2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja , pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.</li> <li>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</li> <li>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh</li> <li>5. organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> </ul>	Tahun 2022

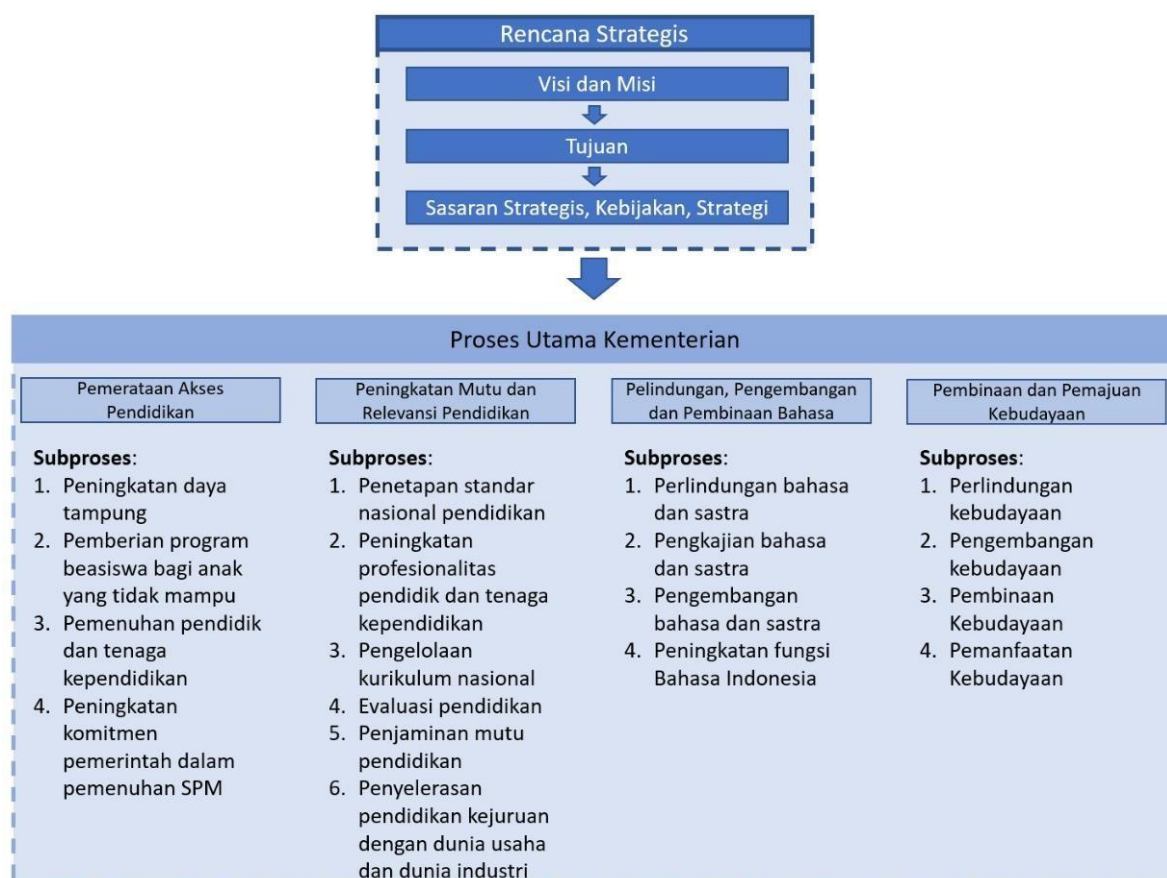
4	Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Direktorat Jenderal Kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara.</li> </ul>	Tahun 2020-2025
---	--	---	---	---	-----------------

### 3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbud harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.

Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, Kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- c. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- i. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- j. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
- o. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian.

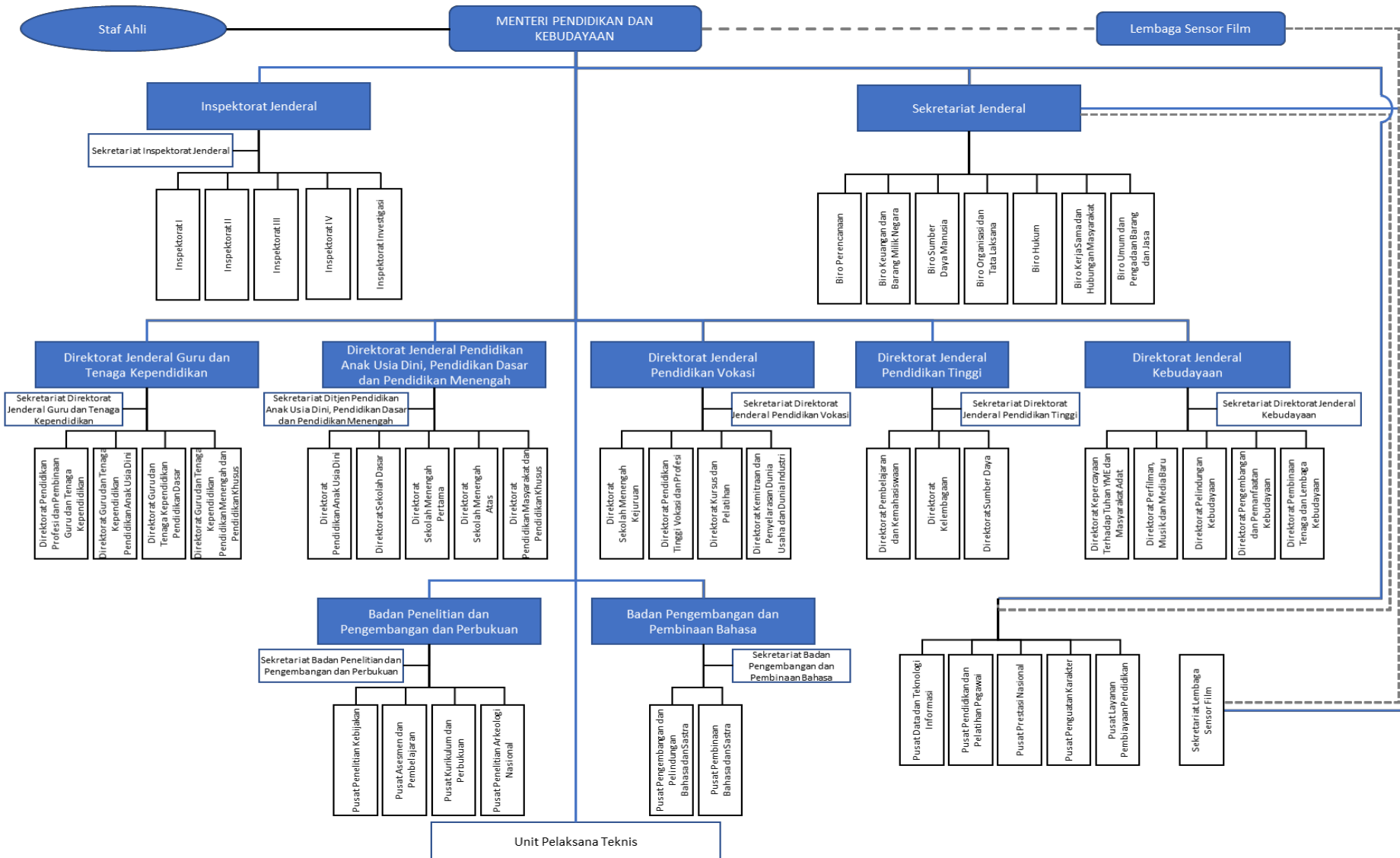
### 3.5.1 Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata



Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Seperti yang terlihat pada gambar di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; dan
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal, sebagai sekretaris pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Sementara itu, masing-masing Direktorat Jenderal dan badan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian.

Selain unit-unit Eselon I, Menteri Pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan.

### 3.5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

a. Kondisi ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbud, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 maka jumlah SDM Kemendikbud saat ini adalah sebanyak 126.074 (seratus dua puluh enam ribu tujuh puluh empat) pegawai.

Tabel 3.3 Jumlah ASN Kemendikbud Tahun 2020

No	Unit	Jumlah
1	Badan Penelitian dan Pengembangan dan	739
2	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	1.325
3	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga	2.778
4	Direktorat Jenderal Kebudayaan	3.298
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,	5.130
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	286
7	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	411
8	Inspektorat Jenderal	433
9	Sekretariat Jenderal	1.582
10	PTN	110.09
	<b>Total</b>	<b>126.07</b>

b. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbud. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja.

### 3.5.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Kemendikbud juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
  - a. layanan peserta didik;
  - b. layanan satuan pendidikan;
  - c. layanan substansi pendidikan;
  - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
  - e. layanan kebudayaan;
  - f. layanan kebahasaan; dan
  - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Se derajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51,00
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau	%	69,0	71,8	74,6	77,4	80,0
<b>SS 3</b>	<b>Menguatnya karakter peserta didik</b>						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai	%	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep	%	10	15	22,5	31	40
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan</b>						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</b>						
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus	indeks	71,5	73	74,5	76	77,5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan: (1) sembilan)program di lingkungan Kemendikbud pada tahun 2020, dan (2) enam program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud</b>		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud</li> <li>b. Opini laporan keuangan Kemendikbud</li> <li>c. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud</li> <li>d. Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN</li> <li>e. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i></li> <li>f. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen</li> <li>g. Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu</li> <li>h. Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan</li> <li>i. Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah</li> <li>j. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK</li> <li>k. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan</li> </ul>
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a. Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)</li> <li>b. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya</li> <li>b. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	a. Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	a. Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
<b>2. Program Guru dan Tenaga Kependidikan</b>		
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)</li> <li>b. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1</li> <li>c. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak</li> </ul>
	Terwujudnya tata kelola	a. Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB



Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Kependidikan yang berkualitas	b. Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah		
	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	a. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun) b. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi) c. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi)
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi) b. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
	Meningkatnya karakter peserta didik	a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai c. Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan d. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen minimal BB b. Jumlah Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
4. Program Pendidikan Vokasi		
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	a. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha b. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR c. Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha d. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR e. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR f. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per c. bidang keahlian d. Persentase SMK yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional e. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD f. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>
	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang	a. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	berkualitas dan berstandar industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional</li> <li>c. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH</li> <li>d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)</li> </ul>
	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri</li> </ul>
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB</li> <li>b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM</li> </ul>
Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i></li> <li>b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i></li> <li>c. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH</li> <li>d. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)</li> <li>e. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan</li> <li>f. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR</li> <li>g. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus</li> <li>h. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase dosen yang bersertifikat</li> <li>b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya</li> <li>c. Persentase dosen berkualifikasi S3</li> </ul>
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB</li> <li>Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM</li> </ul>
<b>6. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan</b>		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni</li> <li>b. Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan</li> <li>c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian</li> </ul>
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan</li> <li>b. Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum</li> <li>c. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian</li> <li>d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah</li> </ul>
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni</li> <li>b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat</li> <li>c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan</li> <li>d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki</li> </ul>

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	a. Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP c. Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar	a. Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar b. Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar
	Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB b. Jumlah Satker Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021-2024, menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, sebagaimana tersaji Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
<b>1. Program Dukungan Manajemen</b>		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud b. Opini laporan keuangan Kemendikbud c. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud d. Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN e. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i> f. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen g. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu h. Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan i. Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah j. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK k. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a. Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM b. Nilai PMPRB Kemendikbud
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	a. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) b. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila b. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	a. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	a. Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi
Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	a. Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	a. Persentase Satker yang berintegritas b. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i> c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud

	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi</li> <li>b. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota</li> </ul>
<b>2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>		
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)</li> <li>b. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1</li> <li>c. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak</li> <li>d. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya</li> <li>e. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan</li> <li>b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</li> <li>c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan</li> </ul>
	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas</li> <li>b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran</li> <li>b. Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran</li> </ul>
	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global</li> <li>b. Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah</li> <li>c. Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan</li> <li>d. Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan</li> </ul>
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP</li> <li>b. Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP</li> <li>c. Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan</li> </ul>
	Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar</li> </ul>
<b>Nama Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>
<b>3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>		
	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya</li> <li>b. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)</li> <li>c. Jumlah kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)</li> <li>d. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)</li> </ul>
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)</li> <li>b. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak</li> </ul>
	Meningkatnya karakter peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter</li> <li>b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum</li> </ul>

	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu</li> <li>b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai</li> <li>c. Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan</li> <li>d. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan</li> </ul>
<b>4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>		
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</li> <li>b. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR</li> <li>c. Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha</li> <li>d. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR</li> <li>e. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR</li> <li>f. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</li> </ul>
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri</li> <li>b. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian</li> <li>c. Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional</li> <li>d. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD</li> <li>e. Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i></li> </ul>
	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi</li> <li>b. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional</li> <li>c. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH</li> <li>d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)</li> </ul>
	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri</li> </ul>
<b>Nama Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>
<b>5. Program Pendidikan Tinggi</b>		
	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya</li> <li>b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i></li> <li>c. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i></li> <li>d. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH</li> <li>e. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)</li> <li>f. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan</li> <li>g. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR</li> <li>h. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus</li> <li>i. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase dosen yang bersertifikat</li> <li>b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya</li> <li>c. Persentase dosen berkualifikasi S3</li> </ul>
<b>6. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni</li> <li>b. Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan</li> <li>c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian</li> </ul>
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase CB dan WBTB yang ditetapkan</li> <li>b. Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum</li> <li>c. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian</li> <li>d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah</li> </ul>

Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni</li> <li>b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat</li> <li>c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan</li> <li>d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki</li> </ul>
Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan</li> <li>b. Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD</li> <li>c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda</li> <li>d. Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya</li> </ul>
Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji</li> <li>b. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik</li> </ul>
Meningkatnya budaya literasi	a. Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)
Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	a. Indeks daya hidup bahasa daerah
Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia</li> <li>b. Jumlah pemelajar BIPA</li> </ul>

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbud dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. periode tahun 2020; dan
2. periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2020

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	22.788,64
2	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	3.593,39
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan	6.050,60
4	Program Pendidikan Vokasi	7.790,28
5	Program Pendidikan Tinggi	32.002,16
6	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya	1.804,61
7	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	221,82
8	Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	935,00
9	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	516,16
<b>Jumlah</b>		<b>75.702,67</b>

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud  
2021-2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)				Jumlah
		2021	2022	2023	2024	
1	Program Dukungan Manajemen	3.219,29	3.315,87	3.415,94	3.517,81	13.468,91
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4.664,24	4.804,17	4.948,30	5.096,74	19.513,45
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	23.265,62	23.963,59	24.682,49	25.422,97	97.334,67
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	8.023,99	8.264,71	8.512,65	8.768,03	33.569,38
5	Program Pendidikan Tinggi	43.726,54	51.038,35	58.568,90	63.326,58	216.660,37
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	2.390,40	2.462,11	2.535,97	2.612,05	10.000,53
<b>Jumlah</b>		<b>85.290,08</b>	<b>93.848,80</b>	<b>102.664,25</b>	<b>108.744,18</b>	<b>390.547,31</b>

## BAB V PENUTUP

Renstra UNIMAL ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Unimal ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran UNIMAL sebagai lembaga pendidikan.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi UNIMAL beserta sasarnya dalam rangka mencapai sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra UNIMAL ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis UNIMAL, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra UNIMAL yang mengacu kepada Renstra Kemdikbud ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan UNIMAL yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 bagi unit kerja di lingkungan UNIMAL, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra UNIMAL ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.